

**BEDAH MAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**KONTEMPORER**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Prodi Hukum Tata Negara

Pada Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**NURUL KARLI**

**Nim: 10200115006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul karli  
NIM : 102001150006  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung pandang, 17 Desember 1997  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Borong Taipa, Desa Bontobiraeng, Kec.  
Bontonompo  
Judul : Bedah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam  
Kontemporer

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul: **"Bedah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer"** benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 2 Agustus 2019

Penyusun,



**Nurul Karli**

NIM. 10200115006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Bedah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”** yang disusun oleh saudara **Nurul Karli, NIM: 10200115006**, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang munaqasyah yang di selenggarakan pada hari selasa, tanggal 06 Agustus 2019 M bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, Selasa 06 Agustus 2019 M  
5 Dzulhijjah 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Kurniati, M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Halimah B, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Penguji II	: Irfan, S.Ag., M.Ag	(.....)

Diketahui oleh,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag  
NIP: 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk kepada seluruh hamba-Nya. Atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis diberikan keteguhan hati dan jiwa semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang senantiasa membawa ajaran Islam dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan, semata-mata agar umatnya berada pada jalan kebenaran. Semoga keberkahan dan keselamatan juga senantiasa diberikan kepada keluarganya, para sahabat, sampai kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan selesainya penulisan skripsi ini dengan judul: **“Bedah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”**, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Ayahanda **Syafruddin** dan Ibunda **Syamsiah** yang tidak hentinya memberikan vitamin ilmu, norma, dan nilai-nilai kehidupan, serta motivasi untuk menjadi mahasiswa yang produktif dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sosok yang senantiasa mendidik, membimbing, dan mengayomi anak-anaknya untuk terus mengasah dan meningkatkan potensi yang dimiliki. Mudah-mudahan Allah swt. senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan kepada mereka.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh stafnya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca, menulis, dan meminjam buku-buku di perpustakaan.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si dan Ibu Dr. Kurniati, M.HI, selaku Ketua Jurusan dan Wakil Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Halimah B, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan, metodologi, dan integrasi keilmuan sejak awal sampai akhir penyelesaian skripsi
6. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si, dan Bapak Irfan, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penguji I dan II yang senantiasa memberikan pendapat, saran, dan kritik dalam menjadikan skripsi ini lebih bermutu, bernilai ilmu, dan memiliki integrasi keilmuan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, baik secara formal maupun nonformal, yang tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman sekelas saya, yang sejak awal duduk di bangku perkuliahan sampai akhir studi, senantiasa memberikan semangat, saling percaya satu sama lain, belajar bersama, saling membantu, dan memberikan arti kehidupan sebagai seorang mahasiswa.
9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat untuk tidak menyerah dalam berbagai hal, dan tidak pernah lupa selalu memberikan doa serta dukungan.
10. Saudara tak sedaraku, Asfira Yuniar, SH, Nur Aisyah Bahar, SH, dan Rahmaniah, SH yang sudah sejak awal masuk kampus tidak pernah lepas. Merekalah yang juga memiliki peran sangat penting dalam hal ini selalu memberikan dorongan dan berjuang sama-sama.
11. Saudara Chalid, S.Ag yang senantiasa membantu dan menjadi teman seperjuangan setiap hari, selalu siap kapan dan dimanapun ketika dibutuhkan.
12. Teman-teman KKN Bajo Barat, Kabupaten Luwu, khususnya teman-teman posko Desa Tettekang, yang senantiasa memberikan arti sebuah kekeluargaan dan kerja nyata di masyarakat. Meskipun hanya berbekal 45 hari, namun suka duka dalam

mengabdikan di masyarakat dirasakan bersama, hingga terwujud harapan yang ditargetkan sebelumnya.

13. Teman-teman KKL Ilmu Falak yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi.
14. Teman-teman PPL Peradilan yang senantiasa dapat bekerjasama, serta membangun komunikasi yang baik dengan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
15. Iqra Damawanti Syaf dan Muslimin Nur Ilahi sebagai kakak dan adik saya yang senantiasa menjadi penyemangat, baik yang berkaitan dengan akademik maupun aktivitas sehari-hari. Semoga kita bertiga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilancarkan segala urusannya.
16. Terima kasih kepada orang-orang yang tidak sempat dituliskan namanya dalam halaman ini. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya, khususnya dalam penyelesaian skripsi hingga mendapatkan gelar yang saya cita-citakan. Dukungan, semangat, dan doa kalian sangat berarti. Mudah-mudahan Allah swt. menjadikannya sebagai ibadah dan amalan kepada kita semua.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen, terutama dalam peningkatan literasi di Indonesia. Penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kesalahan baik secara substansi maupun metodologi. Olehnya itu, besar harapan penulis kepada seluruh pembaca agar memberikan pendapat, saran, dan kritik yang membangun terkait dengan skripsi ini, sebagai acuan penulis untuk berkarya lebih baik lagi kedepannya.

Samata, 2 Agustus 2019

Penyusun

**Nurul Karli**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Metodologi Penelitian.....	19
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	22
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM BEDAH MAYAT</b>	
A. Pengertian Bedah mayat.....	23
B. Macam-macam Bedah Mayat.....	24

	C. Tujuan dan Manfaat Bedah Mayat.....	25
BAB III	PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN TERHADAP BEDAH MAYAT	
	A. Landasan hukum kebolehan bedah mayat berdasarkan	
	Kitab undang-undang Hukum Pidana.....	28
	B. Proses pelaksanaan Bedah Mayat.....	34
	C. Perawatan mayat setelah Otopsi.....	47
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP BEDAH MAYAT	
	A. Ladasan Hukum Bedah mayat dalam Hukum Islam.....	49
	B. Faktor-faktor kebolehan bedah mayat dalam Islam dan Ilmu Kedokteran.....	62
	C. Pandangan Ulama' Kontemporer tentang Bedah Mayat.....	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Implikasi .....	73
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	žai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>damamah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu''ima*

عُدُو : *'aduwwuun*

Jika huruf *kasrah* (يَ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan, 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam* (ال) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (az-zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafẓ al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ dīnullāh دِينَ اللّٰهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ hum fī raḥmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

## ABSTRAK

Nama : Nurul Karli  
NIM : 10200115006  
Jurusan : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Bedah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

---

Permasalahan pokok pada skripsi adalah bagaimana pandangan hukum Islam kontemporer terhadap bedah mayat?. 1) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam Kontemporer terhadap bedah mayat, 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi alasan kebolehan melakukan bedah mayat dalam Hukum Islam dan dalam Ilmu Kedokteran.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*), dengan metode pendekatan Syar'i dan pendekatan Yuridis formal. Sumber data yang digunakan sumber data primer buku fiqh Kontemporer, sumber data sekunder buku fiqh, jurnal dll, dan sumber data tersier, dokumen atau wikipedia. Data analisis bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian, 1) Bedah Mayat dalam pandangan Hukum Islam Kontemporer dibolehkan dengan alasan dilihat berdasarkan tujuan dari dilakukannya, demi kebaikan dan kemashlahatan manusia. 2) Faktot-faktor yang menjadi alasan dibolehkannya bedah mayat dalam Hukum Islam dan dalam dunia Ilmu kedokteran yaitu faktor adanya benda berharga berupa berlian didalam perut jenazah, untuk kepentingan hukum dalam hal penyidikan, untuk kepentingan Ilmu kedokteran untuk menyelamatkan janin yang diperkirakan masih hidup didalam rahim seorang Ibu yang sudah meninggal yang kemungkinan besar masih bisa diselamatkan.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada: 1) Penegak hukum atau pemerintah hendaknya mencari jalan keluar atau cara lain dalam hal kepentingan hukum untuk proses penyidikan dengan cara membedah mayat seseorang, bisa menggunakan cara lain seperti halnya menggunakan sidik jari atau yang lainnya. 2) Kemudian untuk dunia Ilmu kedokteran dalam hal praktik pengetahuan organ tubuh manusia bagi mahasiswa Kedokteran bisa menggunakan replica atau patung yang persis sama dengan manusia beserta organ-organ dalam tubuh manusia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, memiliki kelebihan akal serta kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya., Kecerdasan adalah salah satu anugerah yang tak ternilai harganya oleh apapun. Dengan akal tersebut manusia bisa memahami dan meneliti alam semesta sehingga mereka dapat melakukan perubahan yang sangat pesat pada dunia ilmu pengetahuan sains dan teknologi, termasuk dalam dunia ilmu Kedokteran.

Ilmu kedokteran telah banyak melakukan berbagai macam cara untuk menemukan penemuan-penemuan baru dalam dunia kedokteran dan salah satunya adalah Otopsi, dimana ilmu kedokteran dapat melihat bagaimana anatomi tubuh manusia dan mengetahui sebab akibat penyakit yang ada pada manusia yang membuatnya berujung pada kematian. Anatomi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, sebagaimana Allah swt telah menyiapkan dan menyusun anggota tubuh yang akan melengkapi keperluan hidup manusia nantinya. Dia jadikan kepala yang dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan hidung, mulut, dan anggota tubuh lainnya.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman modern dengan segala problematikanya, menurut para ahli bidang hukum Islam untuk mengiringi laju pembangunan dibidang pemikiran dan kebudayaan yang sering kali perkembangan modernisasi meliputi bidang-bidang sosial politik, ekonomi,

---

<sup>1</sup>Andi Tihardimoto Kaharuddin, *Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia*, ( Cet I. Makassar: alauddin University Press, 2011), h. 1.



kesehatan, serta pengembangan alat-alat produksi maupun teknologi melaju lebih cepat dari solusi pemikiran yang dapat disumbangkan dalam bidang hukum Islam.<sup>2</sup>

Ketika Islam mencapai kejayaannya, studi anatomi dikembangkan para saintis muslim. Para ilmuwan Muslim tak hanya mempelajari buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, namun juga mengembangkan, mengkritisi serta menemukan sesuatu yang baru dalam studi anatomi. Ilmuwan Masyhur bernama Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakariya Razi atau Al-Razi (865 M-925 M) berhasil mematahkan teori humorism yang dikemukakan oleh Galen. Dan Ibnu Zuhr atau Avenzoar (1091 M-1161 M) adalah salah seorang dokter muslim perintis yang melakukan pembedahan manusia dan bedah mayat *postmortem*.<sup>3</sup>

Praktek bedah mayat belum pernah terjadi pada zaman klasik Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil menciptakan penemuan-penemuan baru. Keberhasilannya ditopang oleh penemuan teknologi di bidang Kedokteran untuk keperluan medis dan nonmedis. Ditinjau dari aspek hukum tampaknya tidak ditemukan dalil nash baik Al-quran maupun Hadits yang secara jelas memutuskan tentang hukum bedah mayat tersebut.

Oleh karena itu, bedah mayat/otopsi termasuk kedalam wilayah ijtihad. Yang dimana ijtihad adalah sebuah hasil pemikiran. Diantaranya dengan cara analogi atau melalui penalaran prinsip-prinsip ajaran Islam dengan memperhatikan dan

---

<sup>2</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

<sup>3</sup> Andi Tihardimoto Kaharuddin, *Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia*, h. 4.

mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan terkait dengan keharusan memuliakan hak orang yang masih hidup dan hak orang yang sudah mati.<sup>4</sup> Agar tidak ada seseorang pun yang dapat melakukan hal-hal diluar dari apa yang diinginkan dan menyalahgunakannya maka perlu adanya penalaran prinsip-prinsip ajaran Islam didalamnya.

Sebagaimana tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social. Al-Syatiby dalam kitabnya *Al-Muafaqat fi Ushul Al Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk kemashlahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Kemashlahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan terealisasinya kebutuhan *Tahsiniat* bagi manusia itu sendiri. Kebutuhan *Dharuriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Kebutuhan *Hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Kebutuhan *Tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan

---

<sup>4</sup>Sapiudin, Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 139.

dengan *Al-Mukarrim al-Akhlak*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan mu'amalat.<sup>5</sup>

Kemashlahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Syatibi (m.d 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni :

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan, dan;
- 5) Memelihara harta.<sup>6</sup>

Dari tujuan hukum Islam diatas, yang menjadi dasar boleh atau tidaknya membedah mayat orang yang meninggal adalah “Memelihara Jiwa”. Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan, sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemashlahatan hidup.<sup>7</sup>

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, Allah Swt dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang di Ciptakan-Nya untuk manusia, lalu

---

<sup>5</sup>Alaidin, Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (cet ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 115-118.

<sup>6</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 61.

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.63.

Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran.<sup>8</sup>

Sementara dalam hal penyelesaian suatu perkara, terutama perkara pidana tidak jarang pihak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum akan membutuhkan bantuan dari para ahli dalam pengetahuan masing-masing. Bila bantuan itu berhubungan dengan pengetahuan kedokteran, maka sudah selayaknya bahwa yang dimintai bantuan itu adalah seorang dokter.<sup>9</sup>

Untuk memberikan sebuah bantuan terkait dengan pengetahuan kedokteran untuk masalah kepentingan hukum dan peradilan. Praktik bedah mayat pada banyak kasus banyak dilakukan hanya semata untuk memenuhi hak manusia yang masih hidup tanpa memperhatikan “nasib” si mayat yang sudah tak berdaya.

Sementara dalam Islam sudah di jelaskan bahwa bagaimana Allah Swt. memuliakan jiwa dan jasad seorang Muslim, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Israa’/17:70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (٧٠)

---

<sup>8</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 22-23

<sup>9</sup> Aflanie, Iwan, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (cet.1 Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 5

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang bai-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.<sup>10</sup>

Setelah menggambarkan anugerah-Nya ketika berada dilaut dan di darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka, ayat ini menjelaskan sebab anugerah itu, yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik itu taat beragama maupun tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataan-Nya dengan kata *qad* ayat ini menyatakan bahwa dan kami yakni Allah bersumpah bahwa *sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam* dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berfikir serta berpengetahuan dan kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih.<sup>11</sup>

Setiap orang wajib menghormati dan menghargai sesamanya, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Ajaran agama tentang mengkafani mayat dari memandikan, membungkusnya dengan kain, mengshalatkan, sampai kepada menguburkannya merupakan bentuk penghormatan kepada manusia yang telah mati. Jenazah harus diperlakukan sebaik-baiknya, tidak boleh diperlakukan dengan cara menyakitinya.<sup>12</sup> Karena pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Allah swt adalah sebaik-baiknya makhluk dari makhluk tuhan yang lainnya. Namun tidak sedikit banyaknya kejadian di lapangan, orang-orang yang tidak memikirkan hak-

---

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012) h. 435.

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol.7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

<sup>12</sup>Sapiuddin, Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, h.141.

hak orang lain sering kali menyalah gunakan hal ini, seperti kasus yang terjadi di luar negeri tepatnya di Mozambik, bahwa pada tahun 2004, *Brazilian mission servants* di Mozambik melaporkan bahwa pihaknya telah menemukan praktik perdagangan organ terbesar yang pernah ada. Kasus yang sama terjadi di Somalia pada tahun 2004, sebuah laporan dikeluarkan oleh pemerintah Inggris yang mengungkapkan bahwa ada sekitar 371 anak yang telah diperdagangkan dan ada seorang anak asal Somalia menjadi korban penjualan organ.<sup>13</sup>

Hal ini di akibatkan banyaknya praktik-praktik bedah ilegal yang mengambil organ tubuh manusia yang tidak bertanggung jawab. Adapun permasalahan-permasalahan yang pertama-tama timbul tentang bedah mayat ini paling tidak mencakup tiga permasalahan kemanusiaan berikut ini:

1. Konsep fitrah yang menegaskan bahwa manusia pada asalnya baik dan memiliki anggota badan yang baik dan sempurna.
2. Prinsip keharusan menghormati jenazah.
3. Kewajiban memelihara serta menjaga hak-hak orang yang masih hidup.

Konsep fitrah merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam yang memandang seperti dijelaskan dalam Hadis Nabi bahwa manusia menurut asal kejadiannya adalah baik dan suci yang kesuciannya disejajarkan dengan keaslian, kewajaran, dan kealamian. Meskipun titik berat konsep fitrah itu dikenakan pada bidang kerohanian, namun sering juga dibawa kepada segi lahiriah manusia, yakni tubuh dan jasad manusia. Keterkaitan konsep fitrah dengan sesuatu yang bersifat lahiriah ini tergambar dalam hadis Nabi yang datang dari Ibnu Abbas bahwa yang

---

<sup>13</sup><https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3307683/4-kasus-penjualan-organ-tubuh-paling-mengerikan-di-dunia>

termasuk fitrah manusia adalah khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.

Manusia secara fitrah bersifat *hanif* yang oleh Huhammad Marmaduke Pickthall diterjemahkan sebagai *a man by nature upright* (sebagaimana seorang manusia secara alami berdiri tegak). Tegak bisa berarti secara rohani, tapi bisa juga tegak secara jasmani, yakni manusia adalah satu-satunya makhluk yang berdiri tegak (erektus). Dari sanalah lahir sebuah pandangan bahwa jasmani atau bentuk lahir manusia adalah bentuk pemberian Allah yang paling baik.<sup>14</sup> Hal ini merupakan penafsiran firman Allah swt. dalam QS. Al-Tin/95:4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Terjemahnya :

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.<sup>15</sup>

Kata *taqwin* diartikan sebagai menjadikan sesuatu memiliki qiwam, yakni bentuk fisik yang pas dengan fungsinya. Ar-Raghibal Ashfahani, pakar bahasa al-qur'an memandang kata *taqwin* disini sebagai isyarat tentang keistimewaan manusia dibanding binatang, yaitu akal, pemahaman dan bentuk fisiknya yang tegak lurus. Jadi, kalimat *ahsan taqwin* berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang menyebabkan manusia dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Jika demikian, tidaklah tepat memahami ungkapan *sebaik-baiknya bentuk* terbatas dalam pengertian fisik semata-mata. Ayat ini dikemukakan dalam

<sup>14</sup> Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, h. 140.

<sup>15</sup> Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1076.

konteks penggambaran anugerah Allah kepada manusia dan tentu tidak mungkin anugerah tersebut terbatas pada bentuk fisik saja.<sup>16</sup> Apa lagi secara tegas bahwa, selain sempurna fisik, manusia juga merupakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Swt, melebihi makhluk Tuhan lainnya.

Teknologi di bidang Ilmu kedokteran saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan dampak positif bagi umat manusia, salah satu hasil penemuan di bidang sains ini adalah ditemukannya cara-cara yang baru mengetahui penyebab kematian seseorang untuk proses penyelidikan hukum untuk menguatkan sebuah bukti dan hasil-hasil dari pemeriksaan otopsi tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan dokter yang disebut dalam dunia kedokteran adalah *Visum et repertum*, yakni laporan atau surat keterangan dari seorang dokter dalam hal perkara pidana.

Kegunaan Otopsi pada hakekatnya ini bertujuan untuk membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian, menentukan cara kematian, membantu mengungkapkan identitas jenazah, dan membantu mengungkapkan pelaku kejahatan. Namun tak jarang, pelaksanaan bedah mayat mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, terkhusus dari pihak keluarga korban. KUHP telah memberikan ruang bahwa penyidik berwenang menghadirkan ahli untuk membantu proses penyidikan. Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP, menyebutkan bahwa penyidik POLRI karena kewajibannya berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara hukum.

---

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol.15, h. 436



Bedah mayat tidak hanya digunakan bagi kepentingan hukum saja, akan tetapi juga untuk para calon dokter. Seorang calon dokter, harus mengetahui seluk beluk tubuh manusia. Sehingga ia bisa memahami fungsi bagian-bagian tubuh dan bagaimana cara mengobati penyakitnya. Hal itu, mau tidak mau harus dipraktikkan langsung pada tubuh manusia. Dan yang paling memungkinkan adalah memakai tubuh mayat yang diawetkan, sehingga bisa bertahan selama setahun.<sup>17</sup> Adapun hukum Positif Indonesia yang mengatur tentang otopsi (bedah mayat) di Indonesia terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 133, 134 dan 135.

Sebagai upaya mengembangkan ilmu kedokteran tidak lepas dari upaya mempelajari dan melakukan yang paling dominan adalah tentang manusia dalam kaitannya dengan berbagai macam penyakit dan cara atau metode dalam penanggulangannya, hal ini tidak dapat diketahui tanpa melihat dan meneliti tentang anatomi tubuh manusia. Tentunya percobaan (eksperimen) yang dilakukan oleh seorang dokter tidak dengan serta merta atau sewenang-wenang, akan tetapi seorang dokter mempunyai *Kode Etik Kedokteran* dalam hal menjaga hak-hak seorang pasien dengan seorang dokter, maka untuk itu lahirlah disiplin ilmu hukum yang mempelajari hubungan hukum dengan segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan seperti, hubungan dokter dengan pasien, dokter dengan rumah sakit, pasien dengan tenaga kesehatan, dan sebagainya. Disiplin ilmu kedokteran yang dimaksud adalah Hukum Kesehatan (*Health law*) atau Hukum Kedokteran (*medical law*).

---

<sup>17</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September 2005), h.226.

Ilmu kedokteran pada saat ini banyak melakukan percobaan dalam berbagai hal tentang pengobatan dan ilmu kesehatan serta ilmu kedokteran guna penyidikan sebab-sebab kematian manusia yang dirasakan tidak wajar dengan metode membedah atau meneliti bagian dalam tubuh manusia tersebut. Dalam praktek yang dilakukan oleh para ahli kedokteran dan mahasiswa kedokteran tidak cukup dengan teori-teori yang terdapat didalam buku-buku saja, akan tetapi mereka langsung diperlihatkan berbagai macam anatomi yang terdapat dalam tubuh manusia, oleh karena itu penggunaan mayat manusia untuk pembuktian ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran merupakan hal yang sangat penting karena berbagai alat peraga yang cocok sehingga mendapatkan gambaran langsung dan nyata.

Otopsi dapat dilakukan tanpa melakukan bedah mayat. Misalnya dengan memeriksa kondisi jasad, sidik jari, luka dan sebagainya. Namun tak jarang pula dilakukan pembedahan pada beberapa organ dalam tubuh, bahkan jenazah yang sudah dikuburkan sekalipun biasanya di gali kembali. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan umat manusia untuk menelaah lebih jauh tentang kepentingan dan kemashlahatan, lebih-lebih dari tinjauan kemashlahatan serta keabsahannya menurut hukum Islam.

Pembicaraan mengenai hukum bedah mayat atau yang lebih dikenal dengan sebutan otopsi, tidak lepas dari kajian fiqh Kontemporer sebab praktik otopsi sebagaimana yang dilakukan sekarang merupakan permasalahan yang muncul dewasa ini. Dalam Islam, segala permasalahan yang timbul hendaknya dicarikan jalan keluar (dikembalikan) kepada nash yang ada, baik al-quran atau as-

sunnah.<sup>18</sup> Namun apabila dalam nash tidak ditemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi, maka seorang (ulama') dapat berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk melakukan ijtihad. Dengan tetap memperhatikan tata aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, sehingga seseorang tidak melakukan ijtihad dengan sekehendak hatinya.<sup>19</sup>

Dalam hadis nabi tidak ditemukan keterangan-keterangan yang sahih tentang hukum melakukan otopsi, yang dapat ditemukan hanya dalil-dalil yang berbicara tentang larangan merusak tulang mayat, selain itu terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membedah perut mayat. Hanya saja masalahnya tidak sama persis dengan kasus otopsi. Mereka membedah perut mayat apabila mayat tersebut menelan harta atau didalamnya ada janin yang diyakini masih hidup. Jika melihat pada pendapat yang memperolehkan membedah mayat tanpa batas, hal ini tampaknya tidak dapat dibenarkan karena akan memberikan peluang bagi orang yang masih hidup untuk memperlakukan (merusak oran tubuh simayat) secara bebas dan semaunya.<sup>20</sup>

Meskipun otopsi memiliki peran cukup penting dalam dunia medis. Bahkan menjadi sebuah tuntutan. Namun pada kenyataan dimasyarakat masih banyak orang, terkhusus pihak keluarga mayat yang tidak mau menerima pelaksanaan Otopsi pada tubuh korban karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan seperti; takutnya jenazah di mutilasi, menghormati tubuh jenazah, alasan agama, dll.

---

<sup>18</sup>Hastuti, Dyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Perpektif Hukum Islam terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP.DR.SardJito Yogyakarta)* h. 9.

<sup>19</sup><https://digilib.uin-suka.ac.id> (diakses 28/12/2018)

<sup>20</sup>Sapiudin, Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 145.

Sepert. Maka dalam tulisan ini mencoba untuk menguraikan lebih lanjut alasan-alasan mengapa proses otopsi perlu dilakukan serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positifkan hal tersebut. Agar masyarakat terkhusus orang-orang awam bisa lebih mengetahui manfaat dari sebuah otopsi.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ Perspektif Hukum Islam Kontemporer terhadap Bedah Mayat”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan sebelumnya, maka pokok masalah dalam penulisan ini yaitu “ Bagaimanakah pandangan Hukum Islam kontemporer terhadap Bedah Mayat? ” Untuk dapat membahas secara rinci dan lebih terarah, maka dapat dibagi sub masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bedah mayat?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan kebolehan melakukan bedah mayat dalam hukum Islam dan Ilmu Kedokteran ?

### ***C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan***

Adapun judul penelitian ini adalah Pandangan Hukum Islam Kontemporer terhadap Bedah Mayat. Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dapat dijelaskan dalam beberapa variable berikut ini :

1. Bedah Mayat/Otopsi

Otopsi atau Autopsi (juga dikenal pemeriksaan kematian atau nekropsi) adalah investigasi jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata “autopsi” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “lihat dengan mata

sendiri” dan “Nekropsi” berasal bahasa Yunani pula yang berarti “melihat mayat”.<sup>21</sup>

## 2. Hukum Islam

Ahli hukum Islam mendefenisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu. Sisi terakhir ini hukum Islam disebut dengan kumpulan hukum-hukum *syara'* yang dihasilkan melalui ijtihad.<sup>22</sup>

## 3. Hukum Islam Kontemporer

Kontemporer adalah pada waktu yang sama, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini.<sup>23</sup> Jadi hukum Islam Kontemporer adalah hukum yang berasal dari syariat Islam yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka ini dilakukan untuk menelaah dan mengkaji beberapa literature-literatur hasil penelitian terdahulu yang ada serta berhubungan dengan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Dengan tujuan untuk memberikan sumber-sumber atau gambaran kepada peneliti tentang permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

*Pertama*, Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Kontemporer* tahun 2016, mengemukakan bahwa terdapat hak-hak orang hidup yang perlu di hormati, begitupun dengan orang yang sudah meninggal juga harus mendapatkan

---

<sup>21</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/otopsi> (17/12/2018)

<sup>22</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

<sup>23</sup>KBBI Online, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kontemporer.html> diakses (17/01/2019)

perlakuan yang baik dan penghormatan baginya yang dapat dipahami dari al-qur'an dan hadits yang membawa konsekuensi untuk tidak melakukan sesuatu yang menyakiti si mayat dan tidak membedahnya demi kepentingan manusia lain yang masih hidup. Buku ini juga membahas tentang pengguguran kandungan, menstrual regulation, homoseksual dan lesbian, dll. Sementara penulis ingin meneliti terkait dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap otopsi.

*Kedua*, Iwan Aflanie dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* tahun 2017, menjelaskan bahwa kegunaan dari sebuah otopsi atau bedah mayat ini adalah untuk membantu penegak hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi seperti masalah dalam menentukan sebab kematian seseorang apakah seseorang tersebut mati karena pembunuhan, bunuh diri atau karena kecelakaan. Sementara penulis ingin mengkaji tentang hukum Islam kontemporer memandang otopsi dimasa sekarang ini.

*Ketiga*, Abdul Mun'im Idries, Sp.F dalam bukunya *Pedoman Praktis Ilmu kedokteran Forensik* tahun 2009, ilmu kedokteran selalu berkembang selaras dengan perkembangan masyarakat dan norma yang menatanya. Pelaksanaan praktek ilmu kedokteran dan kepentingan masyarakat yang terkait dengannya, mendorong berkembangnya aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban keduanya saat berinteraksi, yang salah satunya adalah aturan hukum mengenai autopsy klinis. Buku ini, menjelaskan tentang bagaimana ilmu kedokteran mengembangkan penemuan-penemuan seiring dengan perkembangan jaman saat ini, juga memberikan perbandingan antara beberapa jenis otopsi yang dikenal

dalam dalam dunia kedokteran yaitu otopsi klinis dan otopsi forensik. Sementara penulis ingin mengkaji terkait pembedahan hukum bedah mayat dalam Islam.

*Keempat*, Dyah Hastuti dalam skripsinya yang berjudul *Perpektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (studi kasus di Rsup.sardjito Yogyakarta)* tahun 2009 Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, menjelaskan bahwa kemajuan dalam ilmu kedokteran dan ilmu kehidupan berjakan dengan sangat cepat dan menakjubkan terutama dalam perkembangan teknologi kedokteran dan “*Human Engineering*”, karena biosains perlu mempersiapkan demi kesejahteraan manusia dan dibimbing sedemikian rupa agar tidak tersesat menjadi suatu kekuatan yang membinasakan. Sementara penulis ingin mengkaji mengenai tujuan dan maaf dari bedah mayat.

*Kelima*, Gibtiah dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Kontemporer* tahun 2016, menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan zaman modern dengan segala problematikanya, menurut para ahli bidang hukum Islam untuk mengiringi laju pembangunan dibidang pemikiran dan kebudayaan yang sering kali perkembangan modernisasi meliputi bidang-bidang social politik, ekonomi, kesehatan, serta pengembangan alat-alat produksi maupun teknologi melaju lebih cepat dari solusi pemikiran yang dapat disumbangkan dalam bidang hukum Islam. Sementara, penulis ingin mengkaji lebih dalam apa itu otopsi dan bagaimana perkembangannya saat ini yang tidak terlepas kaitannya dengan hukum Islam jika dipandang dari masa sekarang, serta apa saja yang menjadi syarat sebuah otopsi itu bisa dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara penulis

ingin mengkaji tentang pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pembedahan mayat.

*Keenam*, Mohammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam* menjelaskan bahwa Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashlahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Sementara penulis ingin mengkaji mengenai hukum suatu pembedahan menurut pandangan ulama.

*Ketujuh*, Abu Yasid, LL.M. dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Realitas* tahun 2005, seorang dokter harus mengetahui seluk beluk tubuh manusia. Sehingga ia bisa memahami fungsi bagian-bagian tubuh dan bagaimana cara mengobatinya. Hal itu mau tidak mau harus dipraktikkan langsung pada tubuh manusia. Dan yang paling memungkinkan adalah memakai tubuh mayat yang diawetkan sehingga bisa bertahan selama setahun. Maka bisa dipastikan setiap tahun fakultas kedokteran membutuhkan satu tubuh mayat. Selain itu buku ini juga membahas tentang Fiqh Politik, Fiqh Sosial-ekonomi, dll. Sementara penulis ingin mengkaji tentang dasar hukum positif kebolehan membedah mayat.

*Kedelapan*, Aladdin Koto, M.A. dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* tahun 2016. Kebutuhan *Dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka.



Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, myawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiridan disyariatkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar, dan lain sebagainya. Buku ini juga membahas tentang sejarah perkembangan ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh, hukum syar'I, serta sebab-sebab perbedaan pendapat para fuqaha dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah. Sementara penulis ingin mengkaji tentang tujuan dan manfaat dari bedah mayat.

*Kesembilan*, dr. Andi Tihardimoto kaharuddin, S.ked dalam bukunya yang berjudul *Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia* tahun 2011. Anatomi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi mekanik, fisik, dan biokimia, dari makhluk hidup. Fisiologi juga dibagi menjadi fisiologi tumbuhan dan fisiologi hewan, tetapi prinsip dari fisiologi bersifat universal, tidak bergantung pada jenis organisme yang dipelajari. Selain itu buku ini juga membahas tentang sistem gerak pada tubuh manusia, sistem respirasi, sistem reproduksi, sistem saraf dan sistem panca indera. Sementara penulis ingin mengkaji tentang landasan hukum bedah mayat dalam hukum Islam.

*Kesepuluh*, Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqasid syariah*, tahun 2017. Dalam bukunya menjelaskan bahwa, hak pertama dan yang paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh

dihancurkan kemuliannya, Allah Swt dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang di ciptakan-Nya untuk manusia, lalu dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran. Sementara penulis ingin mengkaji tentang pembedahan mayat dalam islam serta landasan hukum bedah mayat dalam hukum Islam.

Dari semua judul dan isi buku yang penulis jadikan bahan acuan dan referensi pada penelitian ini, semuanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, masing-masing memiliki cakupan wilayah pembahasan tersendiri yang di khususkan pada satu topik, yaitu ada yang membahas bedah mayat dari pandangan khusus ditinjau dari hukum Islam dan ada yang membahas khusus dari segi hukum positifnya. Namun, semua referensi tersebut tetap berkaitan dengan judul penelitian.

### **E. Metodologi Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian ini menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai objek kajian dan sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai literature yang ada, yaitu al-Qur'an, hadis, baik hasil penelitian maupun peraturan perundang-undangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang mengkaji secara khusus berdasarkan hukum Islam terkait dengan boleh atau tidaknya seorang mayat di bedah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Pendekatan yuridis formal, yaitu pendekatan dengan mengkaji ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan bedah mayat menurut hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana sebuah informasi (data) tersebut diperoleh. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelusuri literature, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan otopsi, yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder ;

- a. Bahan hukum primer, meliputi:

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>24</sup> Adapun sumber data yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah Undang-undang dan Fiqih Kontemporer.

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h 102.

#### b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari sumber kedua sesudah sumber data primer.<sup>25</sup> Dimana sumber hukum sekunder ini diperoleh baik dalam literature-literatur yang ada seperti; buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun alat elektronik lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, guna untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam kajian ini.

#### c. Data Tersier

Hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, tetapi dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder disebut data tersier. Seperti, Wikipedia, kamus, ensiklopedia, dll.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya, yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>26</sup> Sedangkan analisis adalah suatu kegiatan pengelompokan, atau penjabaran suatu masalah dengan menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan memverifikasi sebuah data agar memiliki nilai sosial, ilmiah dan akademik.

---

<sup>25</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Ed. II : Jakarta: Kencana, 2005), h. 132.

<sup>26</sup><https://idtesis.com/metode-deskriptif> (23/12/2018)

## ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proposal ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terkait dengan bedah mayat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan kebolehan melakukan otopsi dalam hukum Islam dan Ilmu Kedokteran.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, bahwa penulis berharap dari hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsi kepada kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum terhadap pelaksanaan otopsi/bedah mayat yang terjadi didalamnya.
- b. Secara praktis, penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi suatu pengetahuan khusus bagi umat Islam mengenai proses otopsi/bedah mayat dalam segi hukum. Sehingga dapat memahami tentang konsekuensi dan akibat dari sebuah proses otopsi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM BEDAH MAYAT

#### A. Pengertian Bedah Mayat

Bedah mayat atau yang sering dikenal dengan sebutan Otopsi berasal dari kata oto dan opsis. Pengertian otopsi ialah suatu pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompetensi.<sup>1</sup> Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *jirahah* atau *Amaliyah bil al jirahah* yang berarti melukai, mengiris atau operasi pembedahan.<sup>2</sup>

Bedah mayat oleh dokter Arab dikenal dengan istilah *at-tashrih jistul al-mauta*. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematiannya.<sup>3</sup> Kepentingan tertentu dalam proses otopsi ini bukan hanya digunakan untuk dunia ilmu kedokteran saja tetapi juga untuk kepentingan hukum dalam proses pembuktian suatu perkara.

Menurut peneliti otopsi merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang perlu

---

<sup>1</sup>Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers) h. 243.

<sup>2</sup> Imam al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu Fiqh al-Syafi'i*, Tahqiq oleh Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'i (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2005.), h. 54

<sup>3</sup> Kamal Mahmud, *Bedah Mayat dari Segi Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas), h. 12.

ditekankan bahwa forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan bukti dari suatu tindak pidana

## B. Macam-macam Bedah Mayat

Dalam dunia kedokteran, dikenal 3 macam otopsi, yakni:

1. Otopsi Anatomi, adalah otopsi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu dengan mempelajari susunan tubuh manusia yang normal. Bahan yang dipakai ialah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang telah disimpan selama 2x24 jam dilaboratorium ilmu kedokteran kehakiman. Setelah diawetkan dilaboratorium anatomi, mayat yang disimpan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi. Hal ini terdapat dalam pasa 935 KUHPperdata.<sup>4</sup>
  2. Otopsi Klinik, adalah otopsi yang dilakukan terhadap jenazah dari penderita penyakit yang dirawat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Pada autpsi klinik, diperlukan surat pengantar visum dari pihak kepolisian (penyidik) dengan persetujuan anggota keluarga. Keluarga yang berhak memberikan ijin menurut undang-undang yaitu, istri/suami, kedua orang tua kandung, anak yang telah dewasa.<sup>5</sup>
- Otopsi klinik kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan:
- a. Hispatologi
  - b. Bakteriologi/virologi
  - c. Toksikologi

---

<sup>4</sup>Filza Elfrizza Pratiwi, *Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana dalam Upaya Menemukan Kebenaran Material* ) <https://digilib.unila.ac.id> diakses 17/6/2019.

<sup>5</sup><https://www.honestdocs.id/autopsi-otopsi.amp> diakses 17/06/2019

d. Sero-imonologi<sup>6</sup>

3. Otopsi forensik ialah yang dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegakan hukum dalam rangka menemukan kebenaran materil.<sup>7</sup> Untuk melakukan autopsi forensik ini, diperlakukan suatu surat permintaan pemeriksaan/pebuatan *visum et repertum* dari pihak penyidik. Dan keluarga tidak diperlukan, bahkan apabila ada seseorang yang menghalang-halangi dilakukannya autopsi forensik, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>8</sup> Baik dalam melakukan otopsi klinik maupun forensik, ketelitian yang maksimal harus diusahakan. Kelainan yang betapa kecilpun harus dicatat. Autopsi sendiri harus dilakukan sedini mungkin, karena dengan lewatnya waktu, pada tubuh mayat dapat terjadi perubahan yang mungkin akan menimbulkan kesulitan dalam menginterpretasikan kelainan yang ditemukan.

Jadi setiap macam-macam otopsi diatas memiliki peran serta fungsi masing-masing. Ada yang berperan dalam dunia medis maupun dalam rana hukum.

C. Tujuan dan manfaat bedah mayat

Istilah otopsi sering kita dengar, terutama dalam hal kriminal. Tujuan utama dari bedah mayat atau penentuan penyebab kematian seseorang adalah untuk

---

<sup>6</sup>M. Soekary Erfan Kusuma, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga), h.200

<sup>7</sup>Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, h. 244.

<sup>8</sup><https://www.honestdocs.id/autopsi-otopsi.amp> diakses 17/06/2019



mengetahui alat (senjata), yang dipakai untuk membunuh; yaitu, atas dasar jenis luka, dan jeni kekerasan.<sup>9</sup>

Selain itu kegunaan atau manfaat otopsi forensik pada hakekatnya adalah membantu penegak hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, yakni:

1. Membantu menentukan kematian (manner of death = mode of dying),
  - a. Pembunuhan
  - b. Bunuh diri
  - c. Kecelakaan
2. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian, yaitu:
  - a. Kapan dilakukan
  - b. Dimana dilakukan
  - c. Senjata, benda atau zat kimia apa yang digunakan
  - d. Cara melakukan
  - e. Sebab kematian (cause of death)
3. Membantu mengungkapkan identitas jenazah
4. Membantu mengungkapkan pelaku kejahatan.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri, bedah mayat terbagi menjadi dua tujuan besarnya. *Pertama*, bedah mayat klinis yang merupakan otopsi yang dilakukan untuk

---

<sup>9</sup>Abdul Muim, Idries, Agung legowo, Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan* (Jakarta: Sagung seto, 2011). h. 296.

<sup>10</sup>Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, h. 245.

memngetahui penyakit atau penyebab kematian dan untuk mengevaluasi hasil usaha pemulihan kesehatan. *Kedua*, bedah mayat anatomis yang merupakan otopsi yang dilakukan untuk kepentingan ilmu kedokteran.<sup>11</sup>

Jadi pada dasarnya setiap proses ataupun tindakan yang dilakukan oleh hukum dan dunia kedokteran terkhusus dalam proses bedah mayat mempunyai tujuannya masing-masing, akan tetapi mereka tetap bersandar pada kaidah dan aturan-aturan yang ada, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.



---

<sup>11</sup>Allert Benedicto Leuan Noya, *Tujuan Dibalik Prosedur Otopsi*, <https://alodokter.com>, diakses 18/07/2019

**BAB III**  
**PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN**  
**TERHADAP BEDAH MAYAT**

A. Dasar hukum kebolehan bedah mayat menurut Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana

Sebagaimana tujuan ilmu hukum acara pidana yaitu mempelajari hukum mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta mengatur susunan dan wewenang alat perlengkapan Negara penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sarana peraturan hukum acara pidana mempunyai tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, mengadakan tindakan penuntutan secara tepat dan memberikan putusan dan pelaksanaannya secara adil.

Tugas dan fungsi dalam hukum acara pidana pada umumnya melalui alat perlengkapannya kaitannya dengan penegakan hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo yaitu:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran
2. Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat
3. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan dan
4. Melaksanakan keputusan secara adil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amelia Fransiska Rompas, *Kajian Yuridis Pasal 134 Tentang Bedah Mayat dalam penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015), h. 140 diakses 20/06/2019.

Penjelasan diatas mengemukakan bahwa setiap kasus pidana harus mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran agar segala putusan yang nantinya ditetapkan oleh pihak yang berwenang itu adalah keputusan yang adil, maka untuk kasus kematian tidak wajar yang termasuk kedalam lingkup hukum pidana sudah semestinya mengadakan bedah mayat forensik ataupun ilmu pengetahuan yang sama dibidang ilmu bedah mayat.

Adapun hukum Positif yang mengatur tentang otopsi di Indonesia terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 133,134 dan 135.Yakni :

#### Pasal 133

- (1) Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau kedokteran pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.<sup>2</sup>

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang atau korban yang mengalami luka, keracunan ataupun mati yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana maka, penyidik berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran dan juga menyebutkan dengan jelas dalam ayat (3) bahwa

---

<sup>2</sup>KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) (Cet. II: Pusataka Buana, 2014 ), h. 224.

setiap mayat harus diperlakukan dengan baik, serta menghormati mayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya dalam hukum Islam yang memberikan penghormatan kepada seorang mayat tetapi juga dalam hukum positif.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:<sup>3</sup>

- a. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara. Ini biasanya diminta oleh pihak yang berwajib dalam hal menjumpai seseorang dalam keadaan meninggal dunia. Dalam kaitannya ini dokter akan membuat *visum et repertum* sebelum jenazah dikuburkan. *Visum Et Repertum* merupakan surat keterangan ahli yang dibuat oleh dokter, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dengan IDI, dalam tahun 1986 di Jakarta, yaitu untuk membedakan dengan surat keterangan lainnya.<sup>4</sup>
- b. Pemeriksaan terhadap korban, oleh ahli forensik dimaksud untuk mengetahui:
  - 1) Ada atau tidaknya penganiayaan;
  - 2) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;
  - 3) Untuk mengetahui umur seseorang;
  - 4) Untuk menentukan kepastian bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu. Kesemuanya itu, akan dijadikan landasan

---

<sup>3</sup>Abdul Munim Idries, Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan* (Sagung Seto: Jakarta, 2011), h. 291.

<sup>4</sup>Abdul Muim, Idries, Agung legowo, Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, h. 291.

untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal 352, 351, 285, 292, 341, 342, 288, dan 44 KUHP Pidana.

- c. Memberikan keterangan, pendapat serta nasehat sejak pada penyidikan pertama sampai pada sidang pengadilan.
- d. Melakukan pekerjaan teknis yaitu;
  - 1) Melakukan pemeriksaan pertama di Tempat kejadian perkara (TKP)
  - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap korban hidup
  - 3) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
  - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap korban yang meninggal
  - 5) Memimpin penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan
  - 6) Melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia.

#### Pasal 134

- (1) Dalam hal diperlukan dimana untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.<sup>5</sup>

Pasal diatas berisi tentang bagaimana prosedur permintaan ijin kepada pihak keluarga mayat yang akan di otopsi. Dalam ayat 2 seorang penyidik wajib

---

<sup>5</sup>KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), h. 225.

memberikan penerangan sejelas-jelasnya kepada keluarga korban tentang maksud dan tujuan dilakukan otopsi tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu penyidikan dalam hal mengetahui apa saja sebab dari kematian korban. Dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan keluarga korban belum diketahui keberadaannya maka penyidik akan tetap melakukan pembedahan.

#### Pasal 135

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 2 dan pasal 134 ayat 1 undang-undang tersebut.<sup>6</sup>

Penjelasan pasal 135 KUHP, penggalian mayat termasuk dalam pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan, yang tetap didasarkan pada pasal 133 dan 134 KUHP.

Hukum harus ditegakkan meskipun melalui pembedahan mayat dan pembongkaran kuburan untuk mencapai suatu keadilan. Namun kenyataannya, sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat bangsa Indonesia jika terjadi kasus kematian tidak wajar, sedikit banyaknya masyarakat dan aparat penegak hukum yang mengambil tindakan untuk mencari kebenaran materil untuk memperoleh keadilan. Padahal dalam pasal 222 KUHP sudah menjelaskan secara tegas tentang pembedahan mayat harus dilakukan dengan guna untuk peradilan dan barang siapa yang menghalangi proses bedah mayat akan dihukum sesuai dengan hukuman dalam pasal 222 KUHP. Berbeda halnya yang tertera pada pasal 134 KUHP, jika keluarga korban keberatan dengan pelaksanaan otopsi atau bedah mayat maka penyidik harus menjelaskan seberapa pentingnya bedah mayat

---

<sup>6</sup>KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, h. 225.

tersebut, namun terkadang banyak sekali keluarga yang menolak untuk melakukan hal tersebut, hal inilah yang menjadi salah satu masalah dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Selain KUHAP yang mengatur tentang bedah mayat ada juga UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 yaitu undang-undang ini memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.<sup>7</sup>

#### Pasal 118

Berisi tentang prosedur permintaan bedah mayat (*autopsy*). Dalam ayat ini dijelaskan bawa jika ditemukan mayat yang tidak diketahui identitasnya maka perlu diadakan upaya identifikasi penyidik.

#### Pasal 119

Berisi tentang untuk pengembangan pelayanan kesehatan pelaksanaa bedah mayat klinis (*autopsy klinis*) bisa dilaksanakan di rumah sakit. Kemudian dijelaskan tentang tujuan dari bedah mayat, dan penjelasan tentang pentingnya bedah mayat klinis untuk mendiagnosa penyakit dan mengetahui sebab kematian dari seseorang mutlak harus dilakukan.

#### Pasal 121

Berisi tentang pihak yang berkewenangan melaksanakan bedah mayat (*autopsy*) adalah dokter yang sesuai keahlian dan kewenangannya. Kemudian dijelaskan pada saat melaksanakan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi

---

<sup>7</sup>Kitab Undang-undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), h. 9



terhadap tubuh mayat kemudian ditemukan adanya dugaan tindak pidana maka dokter yang melaksanakan bedah mayat berhak melaporkannya kepada penyidik.

#### Pasal 122

Berisi tentang bedah mayat untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat jenis bedah mayat forensik, untuk jenis bedah mayat ini boleh dilakukan oleh dokter ahli forensik dan pelaksanaannya juga harus dilakukan ditempat instalasi forensik di rumah sakit tersebut. Kemudian dalam pasal tersebut juga dijelaskan yang bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik diwilayahnya ialah pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Jadi selain Kitab undang-undang hukum pidana, bedah mayat juga di ataur dalam Undang-undang kedokteran, hal inilah yang menjadi dasar bagi seorang penegak hukum dan ahli forensik dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka dalam kesejahteraan hidup masyarakat.

#### B. Proses pelaksanaan Bedah Mayat

Pelaksanaan otopsi forensik diatur dalam KUHAP, yang pada prinsipnya otopsi baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis prinsipnya dari penyidik dan setelah keluarga diberi tahu serta telah memahaminya, atau setelah 2 hari dalam hal keluarga tidak menyetujui otopsi atau keluarga tidak ditemukan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 134 KUHAP bahwa penyidik yang meminta otopsi mempunyai kewajiban untuk memberikan keinginannya kepada keluarga.

---

<sup>8</sup>*Kitab Undang-undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran* (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), h. 11-12

Sebelum otopsi dimulai, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian:<sup>9</sup>

1. Apakah surat-surat yang berkaitan dengan otopsi yang akan dilakukan telah lengkap?
2. Apakah mayat yang akan diotopsi benar-benar adalah mayat yang dimaksudkan dalam surat yang bersangkutan?
3. Kumpulan keterangan yang berhubungan dengan terjadinya kematian selengkap mungkin.
4. Periksa apakah alat-alat yang diperlukan telah tersedia.

Dalam melakukan otopsi forensik, beberapa hal pokok perlu diketahui:

- a. Otopsi harus dilakukan sedini mungkin.
- b. Otopsi harus dilakukan lengkap.
- c. Otopsi dilakukan sendiri oleh dokter. Artinya, orang yang melakukan pembedahan pada mayat tersebut adalah seorang dokter dan orang yang benar-benar ahli didalamnya atau dokter ahli forensik.
- d. Pemeriksaan dan pencacatan seteliti mungkin. Agar tidak ada kesalahan data saat proses penyidikan berlangsung.

Setelah beberapa hal diatas telah terpenuhi, maka cara melakukan otopsi forensik tidak jauh berbeda dengan otopsi klinik:

- 1). Pemeriksaan luar
- 2). Pemeriksaan dalam, terdiri atas;

---

<sup>9</sup>Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers) h. 245.

- a. Incision (pengirisan)
  - b. Pengeluaran organ dalam
  - c. Pemeriksaan tiap-tiap organ satu persatu
  - d. Pengembalian organ tubuh ketempat semula
  - e. Menutup dan menjahit kembali
- 3). Pemeriksaan penunjang
- 4). Teknik Otopsi, terbagi atas:
- a. Teknik Virchow
  - b. Teknik Rokitansky
  - c. Teknik Letulle
  - d. Theknik Ghon
- 5). Peralatan untuk otopsi
- a. Kamar Otopsi
  - b. Meja Otopsi
  - c. Peralatan Otopsi
  - d. Pemeriksaan untuk pemeriksaan tambahan
  - e. perelatan tulis menulis dan fotografi
- 6). Pemeriksaan luar. Sistematika pemeriksaan adalah:
- a. Label mayat
  - b. Tutup mayat
  - c. Bungkus Mayat
  - d. Pakaian mayat
  - e. perhiasan mayat

f. Benda disamping mayat

7. Tanda kematian

a. Lebam mayat

b. Kaku mayat

c. Suhu tubuh mayat

d. Pembusukan

e. lain-lain

8. Identifikasi umum

9. Identifikasi khusus

a. rajah/tato

b. Jaringan perut

c. kapalan

d. Kelainan pada kulit.

e. Anomali dan cacat pada tubuh

10. Pemeriksaan rambut.

11. Pemeriksaan mata.

12. Pemeriksaan daun telinga dan hidung.

13. Pemeriksaan terhadap mulut dan rongga mulut.

14. Pemeriksaan alat kelamin dan lubang pelepasan.

15. Lain-lain

16. Pemeriksaan terhadap tanda-tanda kekerasan/luka

a. Letak luka

b. Jenis luka

- c. Bentuk luka
- d. Arah luka
- e. Tepi luka
- f. Sudut luka
- g. Dasar luka
- h. Sekitar luka
- i. Ukuran luka
- j. Saluran luka
- k. lain-lain.

#### 17. Pemeriksaan terhadap patah tulang.

Adapun pembedahan mayat dalam dunia ilmu kedokteran anatara lain:

1. Mayat yang akan di bedah diletakkan terlentang dengan bagian bahu ditinggikan (diganjal) dengan sepotong balok kecil. Dengan demikian kepala akan berada pada posisi fleksi maksimal dan daerah leher tampak jelas.
2. Insisi kulit dilakukan mengikuti garis pertengahan badan mulai dibawah dagu, diteruskan kearah umbilicus dan melingkati umbilicus disisi kiri dan seterusnya kembali mengikuti garis pertengahan badan sampai didaerah simpisis pubis.
3. Pada daerah leher, insisi hanya mencapai kedalaman setebal kulit saja. Pada daerah dada, insisi kulit sampai kedalaman mencapai permukaan depan tulang dada (*sternum*) sedangkan mulai di daerah permukaan *epigastrium*. Sampai menembus ke dalam rongga perut.

4. Insisi berbentuk huruf I di atas merupakan insisi yang paling ideal untuk suatu pemeriksaan bedah mayat forensic. Pada keadaan tertentu, bila tidak mengganggu kepentingan pemeriksaan, atas indikasi kosmetik dapat dipertimbangkan insisi kulit berbentuk huruf Y, yang dimulai pada kedua puncak bahu. Insisi pada daerah dada sebelah kanan dan kiri dipertemukan pada garis pertengahan kira-kira setinggi insisura jugularis. Dengan insisis berbentuk huruf Y, maka pengeluaran alat-alat leher menjadi lebih suka.
5. Insisis pada dinding perut biasanya dimulai pada daerah epigastrium dengan membuat irisan pendek yang menembus sampai peritoneum. Dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri yang dimasukkan kedalam lubang insisi ini, maka dinding perut dapat ditarik/diangkat keatas. Pisau diselipkan diantara dua jari tersebut dan insisi dapat diteruskan sampai ke simpisis pubis. Disamping berfungsi sebagai pengangkat dinding perut, kedua jari tangan kiri tersebut berfungsi juga sebagai pemandu (guide) untuk pisau, serta melindungi alat-alat dalam rongga perut dari kemungkinan teriris oleh pisau.
6. Dengan memegang dinding perut bagian atas dan memuntir dinding perut tersebut kearah luar (dilakukan dengan Ibu jari disebalah dalam/sisi peritoneum dan empat jari lainnya disebalah luar/ sisi kulit), dinding dada dilepaskan dengan memulai irisian pada otot-otot sepanjang arcus costae. Pelepasan dinding dada dilakukan terus kearah dada bagian atas sampai daerah tulang selangka dan kesamping sampai garis ketiak depan. Pengirisan pada otot dilakukan dengan bagian perut pisau dan bidang

pisau (blade) yang tegak lurus terhadap otot. Dengan demikian, dinding dada telah dibebaskan dari otot-otot pectorals, dan kelainan yang ditemukan dapat dicatat dengan teliti.

7. Kelainan pada dinding dada dapat merupakan resapan darah, patah tulang maupun luka terbuka. Kulit daerah leher dilepaskan dari otot leher yang berada di bawahnya. Perhatikan akan adanya tanda kekerasan maupun kelainan-kelainan lainnya.
8. Pada dinding perut, diperhatikan keadaan lemak bawah kulit serta otot-otot dinding perut, cacat tebal masing-masing serta luka-luka (bila terdapat)
9. Rongga perut diperiksa dengan mula-mula memerhatikan keadaan alat-alat perut secara umum. Bagaimana penyebaran tirai usus (*omentum*), apakah menutupi seluruh usus-usus kecil, ataukah mengumpul pada satu tempat akibat adanya kelainan setempat. Periksalah keadaan usus-usus adakah kelainan *volvulus*, *intusussepsi*, *infra*, tanda-tanda kekerasan lainnya. Bila mayat telah mengalami operasi sebelumnya, perhatikan pula bagian atau alat-alat perut yang mengalami penjahitan reseksi atau tindakan lainnya. perhatikan adakah cairan dalam rongga perut, bila terdapat cairan, catat sifat dari cairan tersebut *serous*, *purulen*, darah atau cairan keruh. Dinding perut sebelah dalam diperhatikan keadaan selaput lendirnya. Pada selaput lender yang normal, tampak licin dan halus berwarna kelabu mengkilap. Pada kelainan *peritonitis*, akan tampak selaput lender yang tidak rata keruh dengan vbrin yang melekat.

10. Tentukan pula letak sekat rongga badan (diafragma), dengab membandingkan tinggi diafragma terhadap iga digaris pertengahan selangka (*midelavicular line*).
11. Rongga dada dibuka dengan jalan mengiris rawan-rawan iga pada tempat setengah sampai satu sentimeter medial dari batas rawan tulang masing-masing iga. Dengan bagian perut pisau dan bidang pisau yang diletakkan tegak lurus, rawan iga dipotong mulai dari iga kedua terus ke arah kaudal. Pemotongan ini dapat dilakukan dengan mudah pada mayat yang masih muda karena bagian rawan belum mengalami penulangan. Dengan tangan kanan memegang gagang pisau dan telapak tangan kiri memegang punggung pisau. Pisau digerakkan memotong rawan iga-iga tersebut mulai dari iga kedua sampai daerah *Arcus costae*. Lakukan hal yang sama pada sisi tubuh yang lain.
12. Dengan memotong insersi otot-otot diafragma yang melekat pada dinding dada bagian depan sebelah bawah, perlekatan *sternum* dengan *pericardium* dapat dilepaskan.
13. Iga pertama dipotong dengan meneruskan irisan pada iga kedua kearah kraniolateral, dengan demikian, irisan dihindarkan dari mengenai *manubrium sterni* yang keras. Setelah rawan iga pertama terpotong, pisau dapat diteruskan ke arah medial menyusuri tepi bawah tulang selangka untuk mencapai sendi antara tulang dada (*articulation sternoclavicularis*) dan memotongnya. Bila ini telah dilakukan pada kedua sisi maka bagian depan dinding dada telah dapat dilepaskan.



14. Perhatikan pertama-tama letak paru terhadap kandung jantung. Biasanya dengan mencatat bagian kandung jantung yang tampak antara kedua tepi paru-paru. Kandung jantung yang tampak 1 jari di antara paru-paru menunjukkan keadaan pengembangan paru yang berlebihan (pada edema paru atau emfisema paru).
15. Dengan tangan, paru dapat ditarik ke arah medial dan rongga dada dapat diperiksa. Apakah terdapat cairan. Darah atau lainnya.
16. Kandung jantung dibuka dengan melakukan pengguntingan pada dinding depan mengikuti bentuk huruf Y terbalik. Perhatikan apakah rongga kandung jantung terisi oleh cairan atau darah. Periksa pula akan adanya luka baik pada kandung jantung maupun pada permukaan depan jantung sendiri.
17. Iga-iga dipotong mulai rawan iga ke-2 ke arah latero kaudal. Iga pertama dipotong ke arah *latero cranial* untuk menghindari manubrium sterni.
18. tentukan berapa jari kandung jantung tampak antara kedua paru. Kandung jantung dibuka dengan gunting mengikuti huruf Y terbalik.
19. Pada dugaan thrombosis a. pulmonalis permukaan depan bilik jantung kanan diiris memanjang sejajar dengan septum jantung kurang lebih 1 cm lateral dari septum, kemudian diperpanjang dengan gunting ke arah pulmonalis.
20. Alat-alat leher dikeluarkan bersama-sama dengan alat rongga dada, sedangkan usus halus mulai dari yeyenum sampai rectum dilepaskan

tersendiri, kemudian alat dalam rongga perut dikeluarkan bersama alat dalam rongga panggul.

21. Pengeluaran alat leher dimulai dengan melakukan pengirisan insersi otot-otot dasar mulut pada tulang rahang bawah. Irisan dimulai tepat di bawah dagu, menembus rongga mulut dari bawah. Insisi diperlebar ke kanan maupun ke kiri. Lidah ditarik ke bawah sehingga dapat dikeluarkan dari tempat bekas irisan.
22. Palatum molle diiris sepanjang perlekatannya dengan palatum durum sampai bagian lateral dari *plica pharyngea*. Dengan meneruskan pemotongan sampai ke permukaan depan dari tulang belakang dan sedikit menarik alat-alat leher ke arah bawah maka seluruh alat leher dapat lepas dari perlekatannya.
23. Lakukan pemotongan pembuluh darah dan saraf dibelakang tulang selangka dengan lebih dulu menggenggam pembuluh darah dan saraf tersebut. lepaskan perlekatan antara paru-paru dengan dinding rongga dada. Dengan tangan kanan memegang lidah dan dua jari tangan kiri yang diletakkan pada sisi kanan dan kiri hilus paru, alat rongga dada ditarik ke arah kaudal sampai keluar dari rongga paru.
24. Lepaskan *esophagus* bagian kaudal dari jaringan ikat sekitarnya dan buat dua ikatan di atas diafragma
25. *Esophagus* digunting antara kedua ikatan tersebut. tangan kiri menggenggam bagian bawah alat rongga dada tepat di atas diafragma dan

lakukan pengirisan terhadap genggamannya tersebut. alat leher dan alat dalam rongga dada dapat dikeluarkan seluruhnya.

26. *Usus-usus* dilepaskan dengan melakukan dua ikatan pada awal jejunum.

Pengguntingan dilakukan di antara dua ikatan yang dibuat agar isi duodenum dilakukan di antara dua ikatan yang dibuat distal dan mengangkatnya, maka mesenterium yang melekat usus halus dengan dinding rongga perut dapat diiris dekat usus. Pengirisan dilakukan seperti gerakan menggergaji dan dilakukan sepanjang usus halus sampai daerah ileum terminalis. Pada daerah caecum, pengirisan dilakukan terhadap mesokolon, dengan memotong mesokolon pada bagian lateral dan kolon ascendens pada daerah ini.

27. Pada daerah kolon transversum, lepaskan perlekatan antara kolon dan lambung. Mesokolon kembali diiris di sebelah lateral dari kolon *descendens* dengan memisahkannya juga dari limpa dan ginjal kiri. Kolon sigmoid dapat dilepaskan dari dinding rongga perut dengan memotong mesocolon di bagian belakangnya.

28. Rectum dipegang dengan tangan kanan, mulai dari distal diurut ke arah proksimal. Rectum diikat dengan dua ikatan, kemudian diputus di antara dua ikatan tersebut. setelah dilakukan pelepasan usus halus dan usus besar dapat dilakukan pemeriksaan sepanjang usus tersebut.

29. Untuk melepaskan alat rongga perut dan panggul dilakukan pengirisan dimulai dengan memotong diafragma dekat intersinya pada dinding

rongga badan. Pengirisan diteruskan ke arah bawah, sebelah kanan dan kiri, lateral dari masing-masing ginjal sampai memotong *iliaca communis*.

30. Alat rongga panggul dilepaskan dengan melepas peritoneum di daerah simfisis (alat rongga panggul terletak *retroperitoneal*). Kandung kencing serta lain dipegang dengan tangan kiri sampai kebelakang bersama-sama rectum. Pemotongan melintang dilakukan setinggi kelenjar prostat pada mayat laki-laki dan setinggi sepertiga proksimal vagina pada mayat perempuan. Alat rongga panggul kemudian dilepaskan seluruhnya dari perlekatan dengan sekitarnya dan diangkat bersama-sama dengan alat rongga perut yang telah dilepaskan terlebih dahulu.
31. Pemeriksaan pada kepala dimulai dengan membuat irisan pada kulit kepala, dimulai pada prosesus mastoideus, melingkari kepala ke arah vertex, dan berakhir pada prosesus mastoideus sisi lalin. Pengirisan dibuat sampai pisau mencapai periosteum. Kulit kepala kemudian dikupas, ke arah depan sampai kurang lebih 1-2 cm di atas batas orbita (*margo supraorbitalis*) dan ke arah belakang sampai sejauh *protuberantia occipitalis externa*. Perhatikan dan catat kelainan pada permukaan dalam kulit kepala maupun permukaan luar tengkorak. Kelainan yang biasa ditemukan adalah tanda kekerasan, baik merupakan resapan darah maupun garis retak/patah tulang. Untuk membuka rongga tengkorak dilakukan penggergajian tulang tengkorak, melingkari di daerah frontal sejauh kurang lebih 2 cm di atas margo supraorbitalis, di daerah temporal kurang lebih 2 cm di atas daun telinga. Pada daerah temporal penggergajian

dilakukan setelah otot temporalis dipotong dengan pisau terlebih dahulu. Pada daerah temporal ini penggergajian dilakukan melingkar kebelakang kurang lebih 2 cm sebelah atas *protuberantia occipitalis externa*, dengan garis penggergajian membentuk sudut kurang lebih 120 derajat dari garis penggergajian terdahulu. Atap tengkorak selanjutnya dilepas dengan menggunkan pahat berbentuk T (*T-chisel*) dengan jalanmendorong pada garis penggergajian.

32. Setelah atap tengkorak dilepaskan pertama-tama dilakukan penciuman bau yang keluar , sebab pada beberapa jenis keracunan dapat tercium bau yang khas. Dilakukan pengamatan kelainan pada permukaan dalam atap tengkorak maupun durameter. Kelainan dapat berupa luka apda durameter, pendarahan epidural, dll. Durameter kemudian digunting mengikuti garis penggergajian, dan daerah subdural diperiksa adanya pendarahan, pengumpulan nanah, dsb.

33. Otak dikeluarkan dengan memasukkan dua jari tangan kiri digaris pertengahan daerah frontal, antara bagian otak dan tulang tengkorak. Bagian frontal sedikit ditekan, tampak *falxcerebri* yang dapat dipotong atau digunting sampai dasar tengkorak. Kedua jari tangan kiri kemudian atau digunting sampai dasar tengkorak. Kedua jari tangan kiri kemudian sedikit mengangkat bagian frontal dan memperlihatkan *nn.olfactorus*, *nn.opticus*, yang kemudian dipotong sedekat mungkin pada dasar tengkorak. Pemotongan lebih lanjut dapat dilakukan pada aa.karotis interna yang memasuki otak serta saraf-saraf otak yang keluar pada dasar

otak. Dengan memiringkan kepala mayat, serta jari-jari tangan kiri sedikit menarik/ mengangkat bagian peliris (temporalis) sisi lain, tentorium cerebelli tampak jelas dan mudah dipotong, dimulai dari foramen magnum ke lateral menyusuri tepi belakang tulang karang otak (*os.petrosum*). potong saraf-saraf otak yang keluar pada dasar tengkorak. Perlu diperhatikan bula tentorium cerebelli tidak dipotong maka otak kecil akan tertinggal dalam rongga tengkorak.

34. Kepala dikembalikan kepada posisi semula dan batang otak dipotong melintang dengan memasukkan pisau sejauh-jauhnya dalam rongga magnum
35. Dengan tangan kiri menyangga daerah *baga occipital*, dua jari tangan kanan dapat ditempatkan di sisi kanan dan kiri batang otak yang terpotong, kemudian menarik bagian bawah otak dengan gerakan memutar/meluksir hingga keluar dari rongga tengkorak.
36. Setelah otak dikeluarkan, durameter yang melekat pada dasar tengkorak harus dilepaskan dari dasarnya, agar dapat diperhatikan adanya kelainan pada dasar tengkorak.<sup>10</sup>

#### C. Perawatan mayat setelah otopsi

Organ yang telah diangkat dari tubuh mayat biasanya diperiksa dengan mata telanjang terlebih dahulu, karena ada beberapa penyakit yang menyebabkan perubahan tampilan pada organ, sehingga organ bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah selesai, organ dalam yang telah diambil dikembalikan kedalam

---

<sup>10</sup>Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, h. 248-254.

tubuh lagi ataupun disimpan dalam toples isi formalin jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keperluan pembelajaran atau penelitian, misalnya dikampus.<sup>11</sup>

Adapun perawatan secara terperinci setelah otopsi antara lain:

1. Setelah otopsi selesai semua organ tubuh dimasukkan kedalam rongga tubuh.
2. Lidah dikembalikan kedalam rongga mulut sedangkan jaringan otak di kembalikan kedalam rongga tengkorak.
3. Jahitkan kembali tulang dada dan iga yang dilepaskan pada saat membuka rongga dada.
4. Jahitlah kulit dengan rapi menggunakan benang yang kuat , mulai dari bawah dagu sampai kedaerah simfisis.
5. Atap tengkorak diletakkan kembali pada tempatnya dan difiksasi dengan menjahit otot temporalis, baru kemudian kulit kepada dijahit dengan rapi.
6. Bersihkan tubuh mayat dari darah sebelum mayat diserahkan kembali pada pihak keluarga.<sup>12</sup>

Jadi setelah mayat selesai diotopsi maka semua organ tubuhnya dikembalikan kembali dalam tubuh si mayat, kemudian dijahit kembali lalu di kembalikan kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses memandikan, mengkafani kemudian menguburkannya.

---

<sup>11</sup>Fauzan Budi Prasetya, *Seperti ini Proses Otopsi Mayat Untuk Cari Tahu Penyebab Kematian*, diakses dari <https://hellosehat.com> (10/).

<sup>12</sup>Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, h. 255.

## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

#### TERHADAP BEDAH MAYAT

##### A. Landasan Hukum Bedah Mayat dalam Hukum Islam

Kematian seorang manusia adalah berpisahannya ruh dari jasadnya, saat seseorang yang sudah ditinggalkan oleh ruhnya, maka habis sudah masa hidupnya didunia ini.<sup>1</sup> Manusia selain sempurna fisik, manusia juga merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt, melebihi makhluk Allah yang lainnya. sejalan dengan firman Allah swt, dalam surah Al-Israa' 17/70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragama maupun tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataan-nya dengan kata قد, ayat ini menyatakan bahwa *dan Kami*, yakni Allah, bersumpah bahwa *sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam* dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan

---

<sup>1</sup> Muhammad Tambrin, *Pandangan Islam Seputar Otopsi Jenazah*, <https://bimasislam.kemenag.go.id> diakses 10/7/2019.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 289



berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih. *Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan* dengan aneka alat transport yang kami ciptakan dan tundukkan bagi mereka, atau yang kami ilhami mereka perbuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang kesemuanya kami ciptakan untuk mereka. Dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dari hewan dengan akal dan daya cipta sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan manusia melalui perjuangan melawan setan dan nafsu, sedang ketaatan malaikat tanpa tantangan.

Kata كَرَّمْنَا terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *kaf*, *ra* dan *mim* yang mengandung makna kemuliaan serta keistimewaan sesau objeknya. *Karramna* diayat ini adalah manusia yang dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkannya kepada selainnya dan itulah menjadikan manusia mulia serta harus dihormati dalam kedudukannya sebagai manusia.<sup>3</sup>

Jadi ayat diatas menjelaskan bentuk kehormatan, kemuliaan, dan keistimewaan yang dianugerahkan Allah bukan dikhususkan untuk anak cucu Adam as. akan tetapi di anugerahkan untuk seluruh anak cucu Adam as. Sehingga dimiliki oleh

---

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8 h.149-150

setiap orang atau pribadi, yang tidak terkhusus kepada satu suku/ras serta satu agama, tetapi untuk seluruh umat manusia.

Selain itu, berdasarkan keterangan sebuah hadist bahwa seorang mayat dapat merasakan sesuatu seperti halnya orang-orang yang masih hidup. Diriwayatkan ketika seorang sahabat menemukan tulang-tulang manusia kemudian mematahkan, maka nabi melarangnya. Lalu Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسَرِهِ حَيًّا (رواه ابن ماجه)<sup>4</sup>

Artinya :

Telah bercerita kepada kami Hisyām bin Umar, berkata : telah bercerita kepada kami ‘Aziz bin Muhammad al-Dharawardi, telah bercerita kepada kami Sa’ad bin Said, dari ‘Amrah, dari ‘Aisyah telah berkata : Rasulullah Saw bersabda : “Mematahkan tulang orang yang telah mati sama mematahkannya hidup-hidup” (H.R Ibnu Mājah)

Hadist diatas sering dijadikan dasar penolakan keagamaan terhadap pemotongan atau pembedahan organ tubuh manusia yang telah mati. Disisi lain terdapat hak-hak orang yang masih hidup yang perlu di hormati. Tanpa dilakukan bedah mayat maka hak-hak orang yang masih hidup itu susah didapati, seperti untuk keperluan penelitian kedokteran, mengambil barang yang berharga milik

---

<sup>4</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Madina :Dar al-Ihya) j.1, h. 516

orang lain yang terdapat dalam perut si mayat, atau untuk mengambil barang bukti yang ada dalam perut si mayat untuk kepentingan penegakan hukum.

Prinsip penghormatan terhadap seseorang yang sudah mati sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang tersebut diatas membawa konsekuensi untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menyakiti si mayat, termasuk membedahnya untuk kepentingan manusia yang masih hidup. Hal ini menimbulkan kontroversi tentang hukum boleh tidaknya bedah mayat. Namun yang perlu dicermati itu ada tambahan penting oleh Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah kata-kata (dalam dosanya). Dengan demikian hadis tadi berarti, “Mematahkan tulang orang yang telah mati sama dosanya dengan mematahkan tulangnya hidup-hidup”.<sup>5</sup>

Namun, dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang lain dijelaskan bahwa orang yang telah mati atau berada dalam kubur itu tidak dapat mendengar. Keterangan ini dapat dilihat dalam surah ar-Ruum/30:52, Al-Faathir/35:22 dan surah An-Naml/27:80. Berikut ini salah satu ayat tentang itu dalam QS. Al-Naml/27:80 :

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang.<sup>6</sup>

“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar” yakni, engkau tidak dapat memperdengarkan sesuatu yang

<sup>5</sup> Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 143.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 384

bermanfaat bagi mereka, demikian juga kafirnya orang yang didalam hati mereka terdapat penutup dan ditelingsa mereka terdapat sumbat. “ *Dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang*”. Yaitu yang dapat memperkenalkanmu hanyalah rabb yang maha mendengar lagi maha melihat dengan pendengar dan penglihatan yang memebwa manfaat didalam hati dan pandangan orang yang tunduk kepada-Nya serta apa yang dibawa lisan para rasul.<sup>7</sup>

Ayat diatas sudah menjadi alasan bagi mereka yang berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya termasuk jika dipotong organ tubuhnya atau dibedah. Dengan demikian, kewajiban menghormati orang mati seharusnya tidak membawa akibat dilarangnya melakukan sesuatu yang perlu terhadap tubuhnya seperti bedah mayat dan pengambilan sebagian organ tubuhnya untuk dimanfaatkan.

Adapun landasan hukum dibolehkannya bedah mayat berdasarkan faktor-faktor yang menjadi alasan seperti yang dijelaskan diatas, antara lain:

- a. Ketentuan hukum tentang pembedahan mayat untuk menyelamatkan janin

Demi menyelamatkan sebuah janin yang ada didalam rahim seorang Ibu yang sudah meninggal, dan janin tersebut masih hidup dibolehkan dalam Islam. Maka urusan tersebut diserahkan kepada team dokter ahli untuk melaksanakannya, sekaligus merawat janin yang sempat diselamatkan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, bahwa wajib hukumnya membedah mayat bila mengandung janin yang masih hidup. Karena janin tersebut tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya, maka orang hiduplah yang berkewajiban untuk

---

<sup>7</sup>Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2000), h. 54

menolongnya, meskipun dengan melalui pembedahan mayat.<sup>8</sup> Dan bedah mayat ini dilakukan untuk kepentingan yang dianggap darurat itu dibolehkan sesuai dengan kadar dibutuhkannya.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan petunjuk QS.Al-Maaidah/5:32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Allah Swt berfirman karena pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam (Qabil) terhadap saudaranya (Habil) secara zhalim, dan permusuhan, maka كَتَبْنَا “kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil.” Yakni, kami syari’atkan serta kami beritahukan kepada mereka:

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

<sup>8</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2019) h. 127.

<sup>9</sup> Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, h .144

*“Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”* Maksudnya, barang siapa membunuh seorang tanpa sebab, seperti (karena) qishash atau (karena) berbuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dan jiwa yang lainnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan, yaitu mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan meyakini hal itu, berarti dengan demikian, telah selamatlah seluruh umat manusia darinya.

Oleh karena itu Allah berfirman : ( فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) ”maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” Sa’id Bin Jubair berkata: “barang siapa menghalalkan darah seorang muslim, seakan-akan ia telah menghalalkan darah seluruh umat manusia, barang siapa mengharamkan darah seorang muslim, seakan-akan ia telah mengharamkan darah seluruh umat manusia.” Ini merupakan pendapat yang paling jelas.<sup>10</sup>

Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya, atau menyelamatkan seseorang dari kematian akibat satu bencana, atau membela seseorang yang dapat terbunuh secara aniaya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Cet. I, Kairo: 1994M), h. 92-93

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 4, h. 76.

Al-Qur'an telah merujuk kepada kenyataan yang bersifat sosial dan mendidik orang yang membunuh seorang manusia yang tidak bersalah, dalam kenyataannya mempunyai kesiapan untuk membunuh orang-orang yang lain juga. Orang ini, sesungguhnya, seorang pembunuh yang korbannya adalah manusia-manusia yang tidak bersalah. Dan kita tahu bahwa tidak ada perbedaan antara orang-orang yang tak bersalah ditinjau dari sudut pandang ini. Di lain pihak, orang yang karena memiliki sifat filantropi dan emosi-emosi manusiawi, lalu menyelamatkan orang lain dari kematian, dia itu memiliki kesiapan untuk melakukan tindakan yang simpatik ini kepada manusia lainnya yang manapun. Jadi, berkenaan dengan kenyataan bahwa al-Qur'an telah menerapkan frase *fā ka annama* (seolah-olah), tampak bahwa meskipun hidup dan matinya satu orang tidaklah sama dengan hidup dan matinya satu masyarakat, namun ia memiliki keserupaan dengannya. Sekali lagi, dapat dikatakan bahwa dalam potensi, terdapat kemampuan dalam diri seseorang untuk membawa suatu masyarakat yang besar ke dalam eksistensi. Karena itu, melenyapkan satu orang manusia terkadang berakibat lenyap dan terbunuhnya satu generasi.<sup>12</sup>

Selain ayat diatas tentang kewajiban membedah mayat untuk kepentingan janin yang ada dalam rahimnya juga diterangkan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi dengan mengatakan:

وَ إِنْ مَاتَتْ إِمْرَأَةٌ وَ فِي جَوْفِهَا جَنِينٌ حَتَّى شُكَّ جَوْفُهَا لِأَنَّهُ اسْتَبْقَاءَ حَيٍّ  
بِإِتْلَافٍ جُزْءٍ مِنَ الْمَيِّتِ.

---

<sup>12</sup>Allamah Kamal Faqih , dkk, *Nur al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an* ( Cet. II, Jakarta: Nur Al-Huda, 2014 ) jilid IV, h. 381

Artinya:

Dan apabila ada seorang perempuan yang meninggal, padahal dalam perutnya terdapat janin yang masih hidup, maka (wajib) dibedah perutnya. Karena cara memepertahankan kehidupan (janin itu), ia harus dipisahkan dari mayat (Ibunya).<sup>13</sup>

Maka bagaimanapun beratnya suatu pekerjaan membedah tubuh seseorang yang sudah meninggal, akan tetapi ada sebuah nyawa yang harus dipertahankan kehidupannya dan harus diambil dalam rahim seorang Ibu yang sudah meninggal maka apapun alasannya seorang dokter harus menyelamatkan dan membedah tubuh mayat tersebut.

- b. Ketentuan hukum pembedahan mayat untuk mengeluarkan benda-benda berharga dari dalam perut

Hal tersebut dianggap mendesak karena ada tuntutan hak orang yang masih hidup agar benda berharga yang ditelan oleh si mayat itu dapat dikembalikan kepada yang berhak. Jika tidak, maka hal ini akan menjadi beban bagi si mayat.<sup>14</sup> Mayat tersebut akan selamanya disiksa dalam kubur jika pemilik tidak pernah mengikhlaskan benda yang ditelan oleh si mayat. Maka dari itu orang hiduplah yang memiliki kewajiban untuk menolongnya.

Adapun ketentuan hukum Islam tentang pembedahan mayat yang dalam perutnya terdapat benda berharga, diterangkan oleh Abu Ishaq Al-shirazy dengan mengatakan :

---

<sup>13</sup>Mahjuddin, *Masail al-Fiqh (Kasus-kasus aktual dalam Hukum Islam)*, h. 128.

<sup>14</sup>Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 145.



وَإِنْ بَلَغَ الْمَيِّتُ جَوْهَرَهُ لِعَيْرِهِ وَ مَاتَ وَ طَالَبٌ وَ صَاحِبُهَا شُكٌّ جَوْفُهَا وَ رَدَّتِ الْجَوْهَرَةُ وَ  
 إِنْ كَانَتْ الْجَوْهَرَةُ لَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَشُكُّ لِأَنَّهَا صَارَتْ لِلْوَرِثَةِ فَهِيَ كَجَوْهَرَةِ  
 الْأَجْنَبِيِّ وَ الثَّانِي لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ اسْتَلَكَهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ الْوَرِثِ

Artinya:

Dan apabila dimayat telah menelan batu permata orang lain (yang menyebabkan) kematiannya, lalu pemilik (barang itu) menuntut agar dikembalikannya, maka (wajib) membedah perutnya, lalu dikembalikan batu permata itu. Dan apabila batu permata itu miliknya sendiri, maka terjadi dua macam ketetapan hukum: pertama,; diwajibkan membedahnya, karena barang itu milik pewarisnya. Maka disamakan keduanya dengan batu permata orang lain. Kedua: tidak wajib karena barang itu dianggap sudah hancur (habis) dimasa hidupnya, maka tidak ada hubungannya dengan hak milik pewarisnya.<sup>15</sup>

Dari hadis diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa mayat seseorang bisa dibedah dan wajib hukumnya bilamana didalam perutnya terdapat batu permata milik orang lain. Dan apabila batu permata itu miliknya sendiri maka tidak diwajibkan untuk membedahnya dengan alasan batu permata itu dianggap sudah hancur.

- c. Ketentuan hukum pembedahan mayat untuk kepentingan penegak hukum

Menjatuhkan sangsi hukuman bagi terdakwa, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun dan dengan alasan apapun; misalnya pelaku atas meninggalnya korban tidak diketahui dan tidak ada tanda-tanda atau alat bukti yang dapat dijadikan bukti.<sup>16</sup> Hal ini berarti sulit untuk diketahui siapa pelaku atas meninggalnya korban dan juga tidak dapat dibuktikan melalui penyelidikan diluar

<sup>15</sup>Mahjuddin, *Masail al-Fiqh (Kasus-kasus aktual dalam Hukum Islam)*, h. 128.

<sup>16</sup>Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-kasus aktual dalam Hukum Islam)*, h. 124.

badan mayat, maka dibolehkan dalam Islam untuk membedah mayat sebagaimana salah satu cara untuk mencari data-data yang diperlukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Pembedahan mayat ini pula dianggap mendesak karena penegakan hukum secara adil membutuhkan data yang lengkap dan konkret. Misalnya; untuk mengeluarkan peluru yang tembus keperut simayat, atau untuk benda lain serta untuk keperluan otopsi.<sup>17</sup>

Jika penegak hukum tidak mau mengusut kejahatan karena yang dianiaya sudah mati, lalu takut mengadakan pengusutan dengan melalui pembedahan mayat, maka berarti ia memberi jalan kepada penjahat untuk tidak takut beraksi. Padahal perkataan Allah yang mengatakan dalam Qs.Al-Nisa/4:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>18</sup>

Proposisi pelaksanaan keadilan dalam pemerintahan. Ayat ini seraya menyampaikan perintah Allah, mengatakan, ... *dan apabila menetapkan hukum di*

<sup>17</sup>Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 145.

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. ٨٧

*antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...* ayat ini menekankan dan mengatakan bahwa Allah mengawasimu dalam keadaan bagaimanapun kamu berada. Dia mendengar kata-katamu dan melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>19</sup>

Dari firman Allah diatas, menekankan kepada penegak hukum bahwa bongkarlah kuburannya bahkan jika perlu lakukan pembedahan mayat jika memang hal itulah yang bisa menciptakan keadilan bagi siapapun yang menjadi korban agar pelaku dari setiap kejahatan yang meresahkan orang banyak bisa memberikan efek jera.

#### d. Ketentuan Hukum Pembedahan Mayat untuk Kepentingan Penelitian Ilmu Kedokteran

Di dunia ini masih ada jenis-jenis penyakit yang belum diketahui obatnya dan dengan melakukan autopsi klinis, para dokter atau ilmuwan kesehatan akan membedah mayat untuk mencari tahu jalan keluar dan jawaban dari keraguan atau ketidaktahuan mengenai persoalan medis yang mereka hadapi.<sup>20</sup>

Jika memang dibutuhkan mayat sebagai sarana penelitian untuk pengembangan ilmu kedokteran, maka dalam islam dibolehkan. Karena pengembangan Ilmu Kedokteran bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia, sedangkan misi Islam sejalan dengan tujuan tersebut.

Begitu juga halnya agama Islam membolehkan suntikan paru-paru atau limbah yang disebut dengan istilah *mitpunctie* untuk mencegah terjangkitnya

---

<sup>19</sup>Allamah Kamal Faqih , dkk, *Nur al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*, jilid IV, h. 93

<sup>20</sup><https://DalamIslam.com> , *Hukum Membedah Mayat dalam Islam*, diakses 10/072019.

penyakit dalam yang diderita mayat, Karena dinyatakan darurat ditempat yang bersangkutan. Sedangkan darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan, sebagaimana maksud Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

### الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Persoalan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan landasan diatas bahwa memperbaiki nasib seseorang dan untuk kesejahteraan manusia maka diperbolehkan membedah mayat, juga dengan alasan memperbaiki nasib orang yang hidup lebih diutamakan dari pada kepentingan orang yang sudah mati.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bedah mayat dapat dilakukan dengan alasan dan pertimbangan, adanya mashlahat yang besar dibalik proses bedah mayat tersebut, karena otopsi tidak hanya bertujuan untuk ilmu kedokteran tetapi juga untuk para penegak hukum sehingga dapat menciptakan keamanan dalam masyarakat. Jadi bedah mayat untuk tujuan tersebut dibolehkan meskipun mayat tersebut adalah mayat orang muslim maupun orang kafir.

---

<sup>21</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam)*, h. 132

## B. Faktor yang menjadi kebolehan bedah mayat dalam hukum Islam dan Ilmu Kedokteran

Ada beberapa motivasi yang melandasi bolehnya dilakukan pembedahan mayat bagi orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan hukum Islam dan Ilmu kedokteran yang tidak jauh berbeda, antara lain:

### a. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam Rahim mayat

Pada prinsipnya, ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya agar selalu berijtihad dalam suatu hal yang tidak ada nashnya, dengan memberikan pedoman dasar dalam QS.Al-Hajj/22:78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ  
 مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341

*“Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya,”* yaitu dengan harta, lisan, dan jiwa-jiwa kalian. *“dia telah memilihmu”* yaitu, Wahai umat ini! Allah telah memisahkan dan memilih kalian atas seluruh umat serta mengutamakan, memuliakan dan mengistimewakan kalian dengan Rasul-nya yang termulia dan syari’at-nya yang amat sempurna. *“dan dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan,”* yaitu, dia tidak membebani kalian dengan sesuatu yang kalian tidak mampu, serta tidak mengharuskan kalian dengan sesuatu yang memberatkan kalian, kecuali dia menjadikan untuk kalian kelapangan dan jalan keluar.<sup>23</sup>

Untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh manusia, harus menggunakan akal-pikiran yang disebut ijtihad dalam Islam.<sup>24</sup> Dimana ijtihad adalah mengarahkan segala kemampuan untuk menciptakan sesuatu dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh.<sup>25</sup> Hasil dari ijtihad selalu diperuntukkan kepada kemaslahatan umat, dengan ketentuan bahwa kemaslahatan umum lebih penting dari pada kemaslahatan perorangan. Begitu juga kemaslahatan orang hidup lebih diutamakan dari pada orang mati.

b. Untuk mengeluarkan benda yang berharga dalam tubuh mayat

Beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat, yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum Islam, antara lain; seseorang yang menelan

---

<sup>23</sup> Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2000), h. 250-251

<sup>24</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 123-124.

<sup>25</sup> Muhammad Shuhufi, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, Cet.I 2012), h. 11.

permata orang lain, sehingga mengakibatkan ia meninggal. Yang kemudian pemilik permata tersebut menuntut untuk agar permata itu dikembalikan kepadanya, tetapi tidak ada cara lain kecuali dengan membedah perut mayat itu untuk mengeluarkan benda tersebut dari padanya.

c. Untuk kepentingan penegakan hukum

Dalam suatu Negara, diperlukan tegaknya hukum yang seadil-adilnya untuk digunakan mengatur umat. Dalam hal ini penegak hukumlah yang lebih bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan disertai kesadaran seluruh warga Negara tersebut.<sup>26</sup> Otopsi untuk pemeriksaan mayat demi kepentingan pengadilan dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab kematian seseorang.

Didalam sebuah negara tegaknya keadilan hukum adalah hal yang sangat diperlukan dalam mengatur masyarakat, karena penegak hukumlah yang paling bertanggung jawab atas tegaknya keadilan. Dalam proses pembuktian, bedah mayat adalah tindakan memeriksa tubuh mayat yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan menemukan penyakit atau adanya cedera.<sup>27</sup>

Jadi pada dasarnya hukumlah yang menjadi penentu kebijakan atas segala permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat, menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatann tidak boleh dihalang-halangi oleh siapaun dan dengan alasan apapun demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Dan dengan adanya otopsi ini

---

<sup>26</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-Kasus Actual dalam Hukum Islam)*, h. 125

<sup>27</sup> *Hukum Bedah Mayat*, <https://sulutiptek.com> diakses 17/07/2019.

maka penegak hukum harus bekerja sama dengan seorang dokter yang memang benar-benar ahli didalamnya serta jujur, sehingga dari hasil penyelidikannya memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penegak hukum, untuk diketahui sebab akibat tindak pidana tersebut.

d. Untuk keperluan penelitian Ilmu Kedokteran

Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan disegala bidang kehidupan. Oleh karena itu, kita tidak heran bila para sarjana Muslim di abad pertengahan telah menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan dengan melalui karya-karyanya di bidang filsafat, fisika, Biologi, ilmu Kedokteran, Ilmu Kesenian, Matematika, Astronomi dan Sebagainya.

Bertepatan dengan zaman kegelapan yang melanda benua Eropa pada waktu itu, maka bangkitlah pemikir-pemikir Muslim terkemuka yang mengagumkan pencinta ilmu pengetahuan di Negara Barat, seperti al-Kindy, al-Faraby, Ibnu Sina, dll. Pemikiran tersebut inilah yang mula-mula membuka tabir untuk menerangi seluruh penjuru dunia dengan membawa penemuan-penemuannya diberbagai cabang ilmu pengetahuan.<sup>28</sup>

Dari karya-karya para ilmunan inilah yang melahirkan sebuah proses bedah mayat yang memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia medis, dan sudah menjadi tututan dalam dunia Ilmu kedokteran, bahkan disaat munculnya berbagai macam penyakit baru yang ganas yang tidak diketahui asalnya maka otopsilah yang bisa menjadi salah satu cara atau proses untuk mencari jalan keluarnya.

---

<sup>28</sup>Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-Kasus Actual dalam Hukum Islam)*, h. 124-126.



### C. Pandangan Ulama' Kontemporer tentang Bedah Mayat

Sumber wahyu dalam bentuk teks agama baik al-Qur'an maupun hadis telah berhenti turun semenjak Rasulullah saw meninggal dunia. Sementara itu realitas masyarakat terus berubah dan berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan perputaran roda zaman. Realitas masyarakat yang terus berubah itu sering diidentikkan dalam bahasa sosiologi sebagai *sosial change* (perubahan sosial).

Persoalan hukum, termasuk hukum Islam, merupakan bagian dari persoalan sosial. Artinya, perubahan sosial akan memengaruhi perubahan hukum, sebagaimana perubahan hukum juga dapat memengaruhi perubahan sosial. Pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum dapat dilihat pada watak dan peran atau fungsi hukum dalam kehidupan sosial dan tuntutan-tuntutan masyarakat yang dipicu oleh berbagai faktor yang bergerak dalam kehidupan masyarakat.

Terlepas dari fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social control*) yakni untuk mempertahankan stabilitas sosial atau sebagai sarana rekayasa sosial (*sosial engineering*), yang jelas dengan terjadinya perubahan sosial, kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan semakin banyak dan meningkat. Dalam konteks hukum Islam, kondisi semacam ini merupakan suatu tantangan bagi eksistensi hukum Islam itu sendiri.

Dalam menghadapi perkembangan semacam ini, sesungguhnya ditemukan paling tidak ada tiga bentuk reaksi para ahli hukum Islam kontemporer. *Pertama*, reaksi pemikir yang menginginkan agar aturan-aturan kehidupan masyarakat

Islam modern atau kontemporer harus sepenuhnya tunduk pada hukum positif Barat, dengan dalih bahwa fikih Islam tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi secara cepat dan kompleks. *Kedua*, reaksi pemikir yang radikal menentang usaha melakukan adopsi pemikiran dan ide-ide Barat, seraya menghimbau kaum muslimin untuk tetap konsisten pada sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an, hadis, fatwa-fatwa sahabat, dan yurisprudensi Islam para ulama salaf. *Ketiga*, reaksi yang mengambil poros tengah, yaitu dengan memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar Islam merupakan suatu keniscayaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak menutup kemungkinan untuk menyusupkan ide-ide, kebudayaan, dan peradaban asing selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>29</sup>

Menurut pandangan ahli, Mahjuddin dalam bukunya *Masail Al-Fiqh (Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam)* bahwa kebolehan membedah mayat dalam Islam, dilandasi oleh alasan bahwa memperbaiki nasib orang hidup lebih diutamakan daripada kepentingan orang yang sudah mati. Seperti, wajib hukumnya membedah mayat bila dalam perutnya terdapat batu permata orang lain, dan tidak diwajibkan bila batu permata atas nama miliknya sendiri. Artinya, jika batu permata itu miliknya sendiri maka tidak usah dikeluarkan karena lambat laun permata itu akan hancur dan lebur dengan sendirinya didalam perut si mayat.<sup>30</sup> Begitupun pendapat Sapiuddin Shidiq dalam bukunya *Fikih*

---

<sup>29</sup>Abdul Wahid Haddade, *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al Syariah (Membincang Formulasi Konsep Ibnu 'Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fiqh Kontemporer)* (Makassar: Alauddin Press, Cet.I 2014), h.141-142.

<sup>30</sup>Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-Kasus Actual dalam Hukum Islam)*, h. 129.

*Kontemporer* bahwa bedah mayat tidaklah dibenarkan oleh hukum agama kalau tidak darurat atau tidak ada ke mashlahatan didalamnya dan harus disertai izin dari ahli warisnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan diatas bahwa pada dasarnya membedah mayat itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dan untuk kemaslahatan manusia.

Majelis di Majma' Fikih Islami dibawah Rabithah al-alam al Islami (Liga Muslim dunia), diantaranya Abdulaziz bin Abdillah bin Baaz, Abdullah bin Umar Nashif, Abdullah bin Abdurrahman al-Basaam, beserta yang lainnya dalam Muktamarnya yang kesepuluh yang diadakan di Makkah Mukarramah dalam waktu dari hari sabtu 24 shafar 1408 atau 17 oktober 1987 M sampai hari rabu 28 Shafar 1408 H atau 21 Oktober 1987 M telah meneliti tentang permasalahan bedah mayat dan setelah diskusi dan tukar pendapat menetapkan ketetapan berdasarkan dharurat yang dibutuhkan dalam pembedahan mayat dan pembedahan ini menjadi mashlahat yang mengalahkan mafsadat pelanggaran kemuliaan mayat manusia.

Majelis Majma' Fikih Islami dibawah lembaga Raabithah al-alam al-Islami (Liga Muslim Dunia) menetapkan sebagai berikut:

**Pertama:** Boleh membedah mayat untuk satu diantara tujuan berikut:

1. Otopsi (penelitian) dalam tuduhan pembunuhan (criminal) untuk mengetahui sebab kematian atau criminal yang terjadi. Hal itu ketika Hakim (al-Qaadhi) tidak bisa menetapkan secara pasti sebab kematian

---

<sup>31</sup>Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 144.

dan jelas pembedahan tersebut adalah cara mengetahui sebab-sebab tersebut.

2. Penelitian penyakit yang menurut adanya pembedahan untuk dijadikan sebagai bahan terapi pencegahan dan terapi pengobatan yang pas dengan penyakit tersebut.
3. Pendidikan medis dan pembelajarannya sebagaimana kuliah kedokteran.

**Kedua:** keputusan tentang pembedahan mayat untuk tujuan pembelajaran harus memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Apabila tubuh mayat pribadi yang dikenal disyaratkan telah diizinkan olehnya sebelum mati untuk pembedahan mayat atau mengizinkannya ahli warisnya setelah kematian orang tersebut. tidak seharusnya membedah mayat yang jiwanya dilindungi syariat kecuali keadaan darurat.
2. Wajib membatasi pembedahan pada batas darurat saja agar tidak mempermainkan tubuh mayat tersebut secara sia-sia.
3. Tubuh-tubuh mayat wanita tidak boleh dilakukan pembedahan kecuali oleh dokter-dokter wanita, kecuali apabila tidak ada.

**Ketiga :** Pada semua keadaan ini diwajibkan anggota tubuh yang sudah dibedah dikuburkan.<sup>32</sup>

Ada beberapa ulama yang tidak memperkenankan pembedahan pada perut karena hal tersebut dianggap tidak menghormati orang yang sudah meninggal, dan

---

<sup>32</sup>Kholid, *Fatwa: Bagaimana Tentang Membedah Mayat*, <https://klikuk.com/fatwa-bagaimana-tentang-membedah-mayat/#respond> diakses 21/072019.

pembedahan mayat hanya boleh dilakukan jika ada seorang ibu yang meninggal dalam keadaan hamil dan janin yang ada dalam kandungannya berumur enam bulan keatas serta memiliki harapan besar untuk hidup, maka harus dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan dan menyelamatkan janin tersebut.

Selain itu, ada pula beberapa ulama yang tidak memperbolehkan pembedahan mayat dikarenakan dalam proses pembedahan mayat dipotong daging dan tulangnya, diangkat organ tubuh dan disentuh sana-sini. Hal tersebut sama saja tidak memperlakukan mayat dengan baik dan dianggap tidak menghormati orang yang sudah meninggal.<sup>33</sup>

Hukum bedah mayat dalam permasalahan ini, Majelis Ulama Besar di Saudi Arabia telah melakukan pembahasan mengenai hal ini dalam Mukhtamar mereka ke-9 tahun 1396 H/1976 M. Pertemuan itu melahirkan keputusan sebagai berikut:

Untuk keperluan otopsi, baik otopsi forensik maupun otopsi medis, maka Majelis Ulama Besar memutuskan, boleh membedah mayat untuk keperluan tersebut, dengan pertimbangan adanya mashlahat yang besar dibalik otopsi ini. Karena otopsi forensik bertujuan untuk penegakan hukum pidana sehingga terciptanya keamanan dalam masyarakat. Sedangkan otopsi medis bertujuan terjaganya masyarakat dari penyakit yang mewabah.<sup>34</sup>

Majelis ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwah khusus soal otopsi jenazah pada tahun 2009. Fatwa tersebut khusus menghukumi autopsi

---

<sup>33</sup> <https://dalamislam.com>, *Hukum Membedah dalam Islam* diakses 7/072019.

<sup>34</sup> Muhammad Yasir, *Bedah Mayat dalam Tinjauan Hukum Islam*, <https://almanhaj.or.id>, diakses 10/07/2019.

forensik dan klinik. Komisi fatwa MUI memberikan 3 macam ketentaun hukum soal ini. *Pertama*, pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh ditusak. *Kedua*, meskipun pada dasarnya jenazah harus dihormati, MUI membolehkan proses otopsi jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh yang berwenang. Pada ketentuan *Ketiga*, MUI menguraikan beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam proses otopsi:

*Pertama*, otopsi jenazah didaarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syariat seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran. Keputusan melakukan otopsi harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus dilakukan oleh ahlinya.

*Kedua*, otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sesuai dengan ketentuan pertama.

*Ketiga*, jenazah yang akan diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya seperti, dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan.

*Keempat*, jenazah yang dijadikan objek autopsi harus mendapatkan izin dari dirinya saat masih hidup melalui wasiat, ahli waris atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Jadi berdasarkan dari keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa kedua mashlahat yaitu otopsi forensik dan otopsi medis/klinik ini lebih besar di banding mafsadah membedah mayat. Jadi, bedah mayat dengan dasar tujuan demi kemashlahatan manusia maka dibolehkan walaupun mayat tersebut adalah mayat orang muslim ataupun mayat orang kafir.

---

<sup>35</sup>Hafidz Muftisany, *Autopsi dalam Pandangan Ulama*, <https://m-republiks.co.id>, diakses 7/7/2019

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pembedahan mayat dapat dilihat berdasarkan tujuan dari dilakukannya pembedahan mayat tersebut, sebab manusia merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Swt, bahkan ia sudah meninggal, sebab seorang mayat dapat merasakan sesuatu seperti halnya orang-orang yang masih hidup. Disisi lain terdapat hak-hak orang yang masih hidup yang perlu di hormati. Prinsip penghormatan terhadap seseorang yang sudah mati sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang tersebut diatas membawa konsekuensi untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menyakiti si mayat, termasuk membedahnya untuk kepentingan manusia yang masih hidup. Dan jika pembedahan mayat dilakukan semata-mata untuk berniat jahat dalam hal yang tidak pantas maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali Jika pembedahan mayat dilakukan demi kebaikan, seperti halnya untuk kepentingan hukum dan dalam dunia ilmu .
2. Dalam Hukum Islam dan dunia Ilmu kedokteran memiliki faktor-faktor yang sama dalam hal kebolehan melakukan bedah mayat, antara

lain karena alasan untuk kepentingan penegak hokum dalam proses penyidikan untuk mengetahui sebab akibat dari meninggalnya seseorang, untuk menyelamatkan janin yang diyakini masih hidup dan bisa diselamatkan didalam rahim seorang Ibu yang sudah meninggal dunia, dan untuk kepentingan Ilmu kedokteran dalam hal praktik dan penelitian dimana di dunia ini masih ada jenis-jenis penyakit yang belum diketahui obatnya dan dengan melakukan autopsi klinis, para dokter atau ilmuwan kesehatan akan membedah mayat untuk mencari tahu jalan keluar dan jawaban dari keraguan atau ketidaktahuan mengenai persoalan medis yang mereka hadapi.

***B. Implikasi penelitian***

1. Pemerintah hendaknya mencari jalan keluar atau cara lain dalam hal kepentingan hukum dan Ilmu kedokteran untuk proses penyidikan dan praktik pengetahuan organ dalam tubuh manusia dengan cara membedah mayat seseorang. Karena hal ini bertentangan dengan syari'at Islam yaitu dengan tetap menghormati jenazah sama halnya saat ia masih hidup.
2. Dalam dunia Ilmu kedokteran dalam hal praktik pengetahuan organ tubuh manusia bagi mahasiswa Kedokteran bisa menggunakan replica atau patung yang persis sama dengan manusia beserta organ-organ dalam tubuh manusia.



### DAFTAR PUSTAKA

- Aflanie, Iwan, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. cet.1 Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Arikunto, Suharsim. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Prakti*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2010.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Ed. II : Jakarta: Kencana, 2005.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al-Dimasyqi Ibnu Kasir, Al-Imam Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung: Sinar baru Algensindo, 2000.
- Erfan Kusuma, M. Soekary, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Erlagga), h.200
- Elfrizza Pratiwi, Filza, *Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana dalam Upaya Menemukan Kebenaran Material* ) <https://digilib.unila.ac.id> diakses 17/6/2019.
- Fauzan Budi Prasetya. *Seperti ini Proses Otopsi Mayat Untuk Cari tahu penyebab Kematianannya*. diakses dari <https://hellosehat.com> (10/072019).
- Fransiska Rompas, Amelia. *Kajian Yuridis Pasal 134 Tentang Bedah Mayat dalam penegakan Hukum Pidana Indonesia*. (Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015), h. 140 diakses 20/06/2019.
- Faqih, Kamal, dkk. *Nur al-Qur'an: An Englightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*. Cet. II, Jakarta: Nur Al-Huda, 2014. jilid IV
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Husain Jauhar, Ahmad Al-mursi. *Maqashid Syariah*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hastuti, Dyah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. *Perpektif Hukum Islam terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta)*. <https://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses 28/12/2018
- Idries, Mun'im Abdullah, Yuli Budiningsih, Johannis, Djaja Surya Atmadja, Anita Elizabeth, Erwin Kristianto, Ade Firmansyah, Aria Yudhistira, Fitri Ambarsari, Sumy Hastri purwanti, reza Indragiri. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktis Hukum*. cet. Ke-1. Jakarta: Sagung Seto, 2009.
- Kaharuddin, Andi Tihardimoto. *Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia*. Cet I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiq*. cet ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Cet. II: Pusataka Buana, 2014.
- Kitab Undang-undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran*. Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- Kholid, *Fatwa: Bagaimana Tentang Membedah Mayat*, <https://klikuk.com/fatwa-bagaimana-tentang-membedah-mayat/#respond> diakses 21/07/2019.
- Leuan Noya, Allert Benedicto. *Tujuan Dibalik Prosedur Otopsi*, <https://alodokter.com>, diakses 18/07/2019.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-Kasus Actual Dalam Hukum Islam)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: Al-ma'arif, 1976.
- Mustofa, Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: sinar Grafika, 2009), h. 2
- Muftisany, Hafidz. *Autopsi dalam Pandangan Ulama*. <https://m-republiks.co.id>, diakses 7/7/2019.
- Muhammad Bin Yazid, Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Madina :Dar al-Ihya. jilid I
- Mahmud, Kamal. *Bedah Mayat dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008.

- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. vol. 15. Cet. 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. vol. 7. Cet. 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 4. Cet. 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. vol. 8 Cet. 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Sheikh Abdurrahman bin Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Cet. I, Kairo: 1994M.
- Al-Sadawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. *Fiqh Kontemporer*. cet. Ke-1. Gresik: Yayasan Al-Furqon al-Islami, 2014.
- Al-Suyuthi, Imam. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair fi Qawaid Wa Furu Fiqh al-Syafi'i*, Tahqiq oleh Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'i. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2005.
- Shuhufi, Muhammad. *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, Cet. I 2012.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syaukani, Imam. *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wahid Haddade, Abdul. *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al syariah (Membincang Formulasi Konsep Ibnu 'Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fiqh Kontemporer)*. Makassar: Alauddin Press, Cet. I 2014
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas* Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September 2005.
- Yasir, Muhammad. *Bedah Mayat dalam Tinjauan Hukum Islam*.  
<https://almanhaj.or.id>, diakses 10/07/2019.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/otopsi>. Diakses 17/12/2018.
- <https://idtesis.com/metode-deskriptif>. Diakses 23/12/2018.
- KBBI Online, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kontemporer.html>  
Diakses 17/01/2019.

*Hukum Bedah Mayat*, <https://sulutiptek.com> diakses 17/07/2019.

KBBI Online, <https://www.zonereferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum>. Diakses 16/01/2019

<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3307683/4-kasus-penjualan-organ-tubuh-paling-mengerikan-di-dunia>. Diakses 12/12/2018.

<https://dalamislam.com>, *Hukum Membedah dalam Islam* diakses 7/07/2019.

<https://www.honestdocs.id/autopsi-otopsi.amp> diakses 17/06/2019



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 46 Tahun 2019

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI TAHUN 2019**

- Menimbang :**
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing;
  - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- a. Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Danussalam, M.Ag  
2. Dr. Hj. Halimah B, M.Ag.  
Sebagai pembimbing mahasiswa :  
 Nama : Nurul Karli  
 NIM : 10200115006  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
 Judul Skripsi : "Hukum Islam dan Otopsi ( Analisis Hukum Islam Kontemporer)."
  - b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
  - c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNSP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
  - d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata Gowa  
pada tanggal : 02 Januari 2019

Prof. Dr. Danussalam, M. Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

**Tembusan :**

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa; (Sebagai Lampiran)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 399 Tahun 2019

T E N T A N G

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI  
TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** Surat Pemohonan  
Nama : Nurul Karli  
NIM : 10200115006  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019  
Pukul : Ujian Seminar Proposal/Skripsi  
Judul : "Badah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer"
- Membuang** a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi.  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji.  
c. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diwahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pembagian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013, Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** Pertama. Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Danasalam, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Kurniati, M.H.I.  
Pengji I : Dra. Nila Sastrawati, M.Si  
Pengji II : Irfan, S.Ag., M.Ag  
Pelaksana : 1. Baharuddin, S.Ag., M.Hum  
2. Basriyah Mustarin, S.H., M.H
- Kedua. Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi.  
Ketiga. Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019.  
Keempat. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal direskannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Disahkan di Samata Gowa  
Februari 2019  
Prof. Dr. Danasalam, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tertusan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- 379 /SH.01/PP.00.9/02/2019  
Sifat : Penting  
Hal : Undangan Ujian Seminar Proposal

Samata Gowa, 8 Februari 2019

Kepada Yth :

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag | (Ketua)         |
| 2. Dr. Kumati, M.H.I.          | (Sekretaris)    |
| 3. Dra. Nila Sastrawati, M. Si | (Penguji I)     |
| 4. Irfan, S. Ag., M. Ag        | (Penguji II)    |
| 5. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag | (Pembimbing I)  |
| 6. Dr. Hj. Halimah B, M. Ag    | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana                   |                 |

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Proposal/Skripsi atas nama :

Nama : Nurul Karli  
NIM : 10200115008  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/i untuk menghadiri Ujian Seminar Proposal/Skripsi, insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019  
Waktu : Pukul 13.00-14.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.  
NIP. 19521015 199003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



### Persetujuan Pembimbing

Pembimbing penulisan skripsi saudara **NURUL KARLI**, NIM: 10200115006, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **"BEDAH MAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER"**. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Semata, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

Dr. Hj. Halimah B, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

NIP. 19581025 199603 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : J. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 1409 Tahun 2019

**T E N T A N G**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI TAHUN 2019**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar adalah :

- |                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| <b>Membaca</b>    | Surat Permohonan :<br>Nama :<br>N. I. M :<br>Jurusan :<br>Hari/Tanggal :<br>Pihak :<br>Judul : | :<br>Nurul Karli<br>: 10200115006<br>: Hukum Tata Negara (Sistazah Syariah)<br>: Rabu 24 Juli 2019<br>: Ujian Seminar Hasil/Skripsi<br>: "Bedah Niyat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer."   |
| <b>Menimbang</b>  | a. b. c. d.  | Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil Penelitian/Skripsi<br>Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian/Skripsi<br>Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk daerah tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.   |
| <b>Mengingat</b>  | 1. 2. 3. 4. 5. 6.  | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;<br>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;<br>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;<br>Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;<br>Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. |
| <b>Menetapkan</b> | <b>MEMUTUSKAN</b>  |  |
| <b>Pertama</b>    | Ketua<br>Sekretaris<br>Pengji I<br>Pengji II<br>Pelaksana                                      | Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut:<br>Prof. Dr. Darussalam, M.Ag<br>Dr. Kurnias, M.H.I.<br>Drs. Nils Sastrawati, M.Si.<br>Irfan, S.Ag., M.Ag.<br>1. Baharuddin, S.Ag., M.hum.<br>2. Basyira Mustah, S.H., M.H.   |
| <b>Kedua</b>      | Ketiga   | Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi<br>Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/FNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;   |
| <b>Kesempat</b>   |  | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  |
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dikepalai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa; (Sebagai Lampiran)



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-2443/SH.01/PP.00.9/07/2019  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **UNDANGAN HASIL**

Romang Polong, 19 Juli 2019

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag (Ketua)
2. Dr. Kurniati, M.H.I. (Sekertaris)
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. (Penguji I)
4. Infan, S.Ag., M.Ag. (Penguji II)
5. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (Pembimbing I)
6. Dr. Hj. Halimah B, M.Ag. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil /Skripsi atas nama

Nama : Nurul Kadi  
N I M : 10200115006  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Seminar Hasil /Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu 24 Juli 2019  
Waktu : Pukul 10.00 - Selesai  
Tempat : Ruang Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

### PERSETUJUAN PEMBIMBING/ PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **NURUL KARLI, NIM: 10200115006**, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Bedah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasyah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 25 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Prof. Dr. Darussalam, M.Ag**  
NIP. 19621016 199003 1 003

  
**Dr. H. Halimah B, M. Ag**  
NIP. 19581025 19969 2 001

Penguji I

Penguji II

  
**Dra. Nila Sastrawati, M. Si**  
NIP. 19710712 199703 2 002

  
**Irfan, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19710518 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus II : Jl. H. M. Yasin Lingsa No. 36 Rowang Polong – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 04/In Tahun 2019

**T E N T A N G**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2019**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca :** Surat Permohonan
- Nama :** Nurul Kari
- N.I.M :** 10200115009
- Jurusan :** Hukum Tata Negara
- Hari/Tanggal :** Selasa, 06 Agustus 2019
- Prihal :** Ujian Munaqasyah/Skripsi
- Judul :** "Bodoh Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer"
- Membaca :**
- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil Skripsi;
  - Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
  - Bahwa maka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas melakukan kegiatan dimaksud.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1996 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Mendeptagani Surat Keputusan;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :**
- Pada :** Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- |            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Ketua      | Prof. Dr. Umarulhasan, M.Ag |
| Sekretaris | Dr. Kurniati, M.H.I         |
| Penguji I  | Dr. Tika Sembiring, M.Si    |
| Penguji II | Idlan, S.Ag, M.Ag           |
| Pelaksana  | Agus Basyah, S.E            |
- Ketua :** Panitia bertugas mengorganisir penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi.
- Ketua :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIP/WAPB/PM/PP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Kesimpulan :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Ransatu – Gowa, (Setengah Legitimasi)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-354 /SH.O1/PP.00.9/07/2019  
Sifat : Penting  
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah/Skripsi**

Romang Polong, 30 Juli 2019

**Kepada Yth :**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. | (Ketua)         |
| 2. Dr. Kumiaty, M.H.I.         | (Sekertaris)    |
| 3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. | (Penguji I)     |
| 4. Irfan, S.Ag., M.Ag          | (Penguji II)    |
| 5. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag  | (Pembimbing I)  |
| 6. Dr. Hj. Halimah B, M.Ag     | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana                   |                 |

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Nurul Karli  
NIM : 10200115006  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/i pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Agustus 2019  
Buka Sidang : 08.30 Wita  
Waktu : Pukul 09.00-10.00 Wita  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“BEDAH MAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER”** bernama Nurul Karli, NIM: 10200115006, merupakan anak terakhir dari Tiga bersaudara. Terlahir dari kedua orang tua yang teramat mulia, ayahanda Syafruddin dan Ibunda Syamsiah,

penulis dilahirkan di Ujung pandang, pada tanggal 17 Desember 1997.

Penulis sempat menapaki jenjang pendidikan di SDN Kokowa pada tahun 2003-2009, kemudian pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah Limbung tahun 2009-2012 dan jenjang sekolah menengah di SMAN 1 Bajeng pada tahun 2012-2015, di tahun yang sama yakni tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) hingga tahun 2019.